

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak Indonesia dalam penjajahan Belanda dan Jepang telah bermunculan gerakan Islam atau disebut organisasi Islam di Indonesia, seperti Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta,¹ Al-Islah wa Al-Irsyad didirikan oleh Syeikh Ahmad Surkati al-Anshari pada tahun 1914, Persis didirikan oleh K.H Zamzan pada tanggal 17 September 1923 di Bandung,² Nahdlatul Ulama didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari pada 31 Januari 1926,³ dan Al-Jam'iyatul Washliyah didirikan di Medan tanggal 30 November 1930 oleh siswa-siswa Al-Maktab Al Islamiyah yang dipimpin oleh Syeikh

¹ Muhammadiyah adalah organisasi sosial Islam yang didirikan di Yogyakarta oleh KH Ahmad Dahlan (Lihat Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, cetakan ke-8, 1996), hlm. 84 dan Slamet Abdullah dan Muslich KS, *Seabad Muhammadiyah Dalam Pergumulan Budaya Nusantara*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2010), hlm. 41.

² Persatuan Islam adalah sebuah organisasi gerakan Islam di Nusantara didirikan tanggal 17 September 1923 oleh KH Zamzam di Bandung, (lihat Deliar Noer, *Gerakan Moderen.....*, hlm. 95.

³ NU adalah suatu Jam'iyah yang berasaskan Islam, bertujuan menegakkan Syari'at Islam berhaluan Ahlu as-Sunnah wal Jama'ah, (KH. Saifuddin Zuhri, *Kaleidoskop Politik di Indonesia*, jilid 1, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 85. Jam'iyah ini didirikan di Surabaya yang disebut sebagai Jam'iyah Nahdlatul Ulama (lihat M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia sebuah potret pasang-surut*, (Jakarta: Rajawali, 1993), hlm. 101.

Muhammad Yunus dan siswa-siswa Madrasah Al-Hasaniah yang dipimpin oleh Syeikh Hasan Ma'shum.⁴

Syi'ah masuk dan berkembang di Indonesia melalui empat fase. Pada fase pertama menurut A. Hasymi, Syi'ah sudah masuk ke Indonesia sejak masa awal masuknya Islam di Indonesia yaitu 1 Muharram 225 H/840 M. Sebuah kapal layar yang datang dari teluk Kambay Gujarat yang membawa angkatan dakwah berjumlah 100 orang kebanyakan tokoh Syi'ah Arab, Persia dan Hindi di bawah pimpinan Nakhoda Khalifah berlabuh di Bandar Perlak Aceh.⁵ Namun A. Hasymi belum dapat menunjukkan bukti-bukti secara ilmiah, sehingga masih perlu ditelusuri melalui sumber-sumber lain. Sejak tahun 225 H itu Syi'ah telah membangun kerajaan Islam di Perlak. Akan tetapi, kemudian ajaran Islam Sunni menyebar di kalangan Syi'ah yang tidak disukai mereka berakibat timbul beberapa kali perang saudara. Dalam peperangan terakhir terjadi perdamaian dengan kesepakatan pembagian wilayah kekuasaan, yaitu Perlak Pesisir untuk golongan Syi'ah dengan mengangkat Sultan Alaidin Syed Maulana Shah yang memerintah dari tahun 365-377 H/976-988 M dan wilayah dan Perlak Pedalaman untuk kelompok Ahlus Sunnah wal jama'ah dengan mengangkat Sultan Makhdom Alaidin Malik Ibrahim Shah Johan Berdaulat yang memerintah dari tahun 365-402 H/986-1023 M.⁶ Sejak saat itu orang-orang Syi'ah tidak menampakkan diri atau sembunyi sampai muncul gelombang kedua masuknya Syi'ah ke Indonesia yaitu setelah revolusi Islam Iran tahun 1979. Sejak

⁴ Mustafa Kamal Fasha dkk, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Tajdid*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm. 37-38, lihat juga Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Mutiara, 1979), hlm.195

⁵ A. Hasymi, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1989), hlm. 146, 156, lihat juga M.Yunus Jamil, *Tawarikh Raja-raja Kerajaan Aceh*, (Banda Aceh: Ajdam I Iskandarmuda, 1968), hlm. 6-8.

⁶ A. Hasymi, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya.....*, hlm. 198-199.

pertama kali Syi'ah masuk ke Indonesia negara ini sudah menganut bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan demokrasi, ber-ideologi Pancasila dan seperangkat peraturan per-undang-undangan yang bersumber dari UUD 1945.

Perjalanan panjang sejarah Syi'ah lebih dari 100 tahun telah diwarnai berbagai konflik sosial dan politik baik di negara-negara Timur Tengah maupun di Indonesia. Syi'ah sudah berkembang di berbagai negara, terutama negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, Turki, Suriah, Lebanon, dan Iran sebagai satu-satunya negara yang memiliki pengikut Syi'ah terbesar dan menguasai Negara (politik).

Dunia Islam dalam praktik kenegaraan menggunakan bentuk negara yang berbeda-beda berdasarkan atas relasi antara agama dan negara yaitu: *Pertama*, praktik yang menyatukan agama dengan negara sebagai satu kesatuan institusi. *Kedua*, memisahkan agama dengan negara (sekular). *Ketiga*, agama dengan negara tidak menyatu, tetapi tidak juga terpisah melainkan setara dan saling melengkapi (*egaliter-komprehensif*).⁷ Praktik yang berbeda tersebut berkait erat dengan pemahaman dan penalaran yang dilakukan oleh umat Islam.

Menurut Abu al-A'la al-Maududi, konsep negara ideal adalah negara berideologi Islam yang dapat menjamin setiap aspek kehidupan masyarakat sejalan dengan norma-normanya. Negara Islam hanya bisa diwujudkan dengan menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara.⁸ Pentingnya syariat Islam sebagai konstitusi negara untuk mencapai tujuan negara yaitu: menciptakan masyarakat yang saling melindungi kebebasan, tidak saling

⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 2, yang menyebut bentuk praktik kenegaraan yang ketiga dengan istilah sembiosisme mutualisme.

⁸ Abu al-A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, (Pakistan: Islamic Publications Ltd, 1997), hlm. 165.

memeras, melindungi seluruh bangsanya dari invasi asing dan mengembangkan sistem keadilan sosial yang berkeeseimbangan.⁹

Ketika membicarakan tentang teori negara, Ibnu Sina memulai dengan masalah rakyat baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga yang kemudian barulah ia datang sebagai warga dari suatu negara. Tentang nama negara yang dicita-citakan Ibnu Sina adalah: *Pertama*, negara Utama (*Al-Madinatul Faadhilah*). *Kedua*, negara Keadilan (*Al-Madinatul 'Aadilah*) sebagai yang dicita-citakan Plato. *Ketiga*, negara Kebajikan (*Al-Madinatul Hasanah as-Sayyidah*) yaitu nama yang dihubungkannya kepada perbuatan/tindakan kepala negara yang berjiwa kerakyatan dan kemasyarakatan.¹⁰

Sebagai sebuah kelompok Islam yang besar, Syi'ah juga mempunyai pemikiran politik yang diimplementasikan dalam negara seperti Iran. Dalam pemikiran politik Syi'ah menggunakan *Imamah* sebagai sistem pemerintahan dan bentuk negara. Pandangan Syi'ah ini menarik dikaji melalui penelitian berdasar atas pertimbangan: *Pertama*, umat Islam dan komunitas negeri berpenduduk muslim mempunyai pandangan yang berbeda tentang konsep negara. *Kedua*, Syi'ah kelompok besar dalam Islam yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan politik di dunia Islam. *Ketiga*, pemikiran politik Syi'ah tentang negara mempunyai tujuan ideal, yakni terciptanya kesejahteraan warga negara.

Kelompok umat Islam yang terbelah menjadi Sunni dan Syi'ah sampai sekarang tidak bisa disatukan, karena perbedaan pandangan tentang pengganti kepemimpinan umat Islam setelah Rasulullah wafat. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah apakah perbedaan ini berimplikasi pada perbedaan aspek politik lainnya

⁹ Abu al-A'la al-Maududi, *The Islamic Law and.....*, hlm. 166.

¹⁰ Zainal Abidin Ahmad, *Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Sina*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 37.

sehingga penting untuk diketahui? Penganut Syi'ah diperkirakan mencapai antara 10-20 % dari jumlah umat Islam di seluruh dunia yang tersebar di berbagai kawasan dunia Islam. Mayoritas Syi'ah berada di Iran, Irak, Azerbaijan dan Bahrain serta memiliki populasi yang kurang signifikan di Libanon, Suriah, Pakistan, India, Bangladesh, Kuwait, Arab Saudi dan Mesir.¹¹

Sebagai bukti Syi'ah telah ada di Indonesia adalah batu nisan makam Maulana Malik Ibrahim di Gersik yang ada tanda-tanda Syi'ah, yaitu tulisan ayat kursi yang disertai nama Nabi dan sahabat Ali yang berbeda dengan makam para Wali yang biasanya hanya bertuliskan empat nama sahabat saja.¹² Raja pertama kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Aceh Marah Silu adalah memeluk Islam versi Syi'ah dengan gelar Malikul as-Saleh, tetapi kemudian pada masa Sultan Iskandar Tsani kekuasaan dipegang oleh Ulama Sunni. Pada saat itu orang-orang Syi'ah bersembunyi tidak menampakkan diri sampai munculnya gelombang kedua masuknya Syi'ah ke Indonesia yaitu setelah revolusi Islam di Iran. Pada gelombang kedua ini Syi'ah tidak mengalami benturan dengan kelompok Islam Sunni atau kelompok lainnya, karena bentuk penyebaran Islam yang mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi. Hubungan antara Sunni-Syi'ah selama periode kedua ini umumnya baik, berbeda dengan peristiwa yang terjadi di beberapa Negara lain, seperti di Pakistan, Irak atau Arab Saudi.¹³

Dengan menggunakan *taqiyah* (sembunyi) sebagai cara orang-orang Syi'ah dalam menyebarkan ajarannya, maka sulit

¹¹ Sabara, "Geliat Syiah, Perubahan Paham dan Perilaku Keagamaan Mahasiswa Muslim di Kota Makassar", *Harmoni Jurnal Multikultural & Multireligius* Volume 11, Nomor 4, Oktober –Desember 2012, hlm. 48.

¹² Moh. Hasim, "Syi'ah: Sejarah Timbul dan Perkembangannya di Indonesia", (Jakarta: *Harmoni*, Jurnal Multikultural dan Multireligius, volume 11, Nomor 4, Oktober-Desember 2012), hlm. 29.

¹³ Moh. Hasim, "Syi'ah: Sejarah Timbul dan Perkembangannya", hlm. 29.

untuk memperkirakan jumlah pengikut Syi'ah di Indonesia. Namun demikian seorang ulama Syi'ah asal Lebanon Muhammad Jawad Mughniyyah menulis dalam buku *al-Shi'a fi al-Mizan* yang terbit tahun 1973, mengatakan bahwa pemeluk Syi'ah di Indonesia pada saat itu berjumlah 1.000.000 (satu juta) orang. Hal yang perlu diketahui juga bahwa sebelum revolusi Iran tahun 1979 sejumlah pemuda Indonesia belajar di Qum, Iran. Selain di Najaf dan Karbala di Irak serta Masyhad di Iran, Qum menjadi salah satu dari empat kota suci milik Syi'ah yang banyak dikunjungi untuk berziarah dan studi. Pada tanggal 21 Juni 1976 berdiri yayasan Pesantren Islam Bangil yang dikenal dengan nama YAPI Bangil didirikan oleh Husein al-Habsy (1921-1994), beliau pernah belajar kepada Abdul Qadir Balfaah, Muhammad Rabah Hassuna, Alwi bin Thahir al-Haddad dan Muhammad Muntasir al-Kattani di Malaysia. Pesantren YAPI Bangil kemudian dikenal sebagai lembaga pendidikan Syi'ah tertua di Indonesia. Para santri diajarkan secara khusus akidah Syi'ah. Pelajaran fiqh Syi'ah juga diajarkan kepada para santri untuk mengimbangi pelajaran fiqh berdasarkan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.¹⁴

Dengan demikian secara kultural masuknya Syi'ah ke Indonesia bersamaan dengan kedatangan Islam ke Nusantara melalui jalur perdagangan dan dakwah menggunakan strategi *taqiyah*. Setelah terjadi Revolusi Islam Iran tahun 1979 baru kemudian menggunakan gerakan yang bersifat intelektual. Setelah kehadiran alumnus Qum, gerakan Syi'ah mulai mengembangkan Fiqh Syi'ah sehingga muncullah lembaga-lembaga Syi'ah.

Aktivitas Syi'ah di Indonesia tersebar di pulau Jawa dan beberapa daerah di luar pulau Jawa. Syi'ah hidup dan berkembang

¹⁴ Abu Mujahid, Jejak Langkah Syi'ah di Indonesia, dalam *Asy-Syariah* diterbitkan oleh Oase Media, Yogyakarta: Banyuraden, Gamping Sleman, DIY, hlm. 42.

dalam wilayah Indonesia yang berpenduduk mayoritas penganut Islam Sunni dan dalam sistem politik demokrasi yang terbuka terhadap nilai-nilai dan peradaban yang kompleks. Dengan demikian, tidak terhindarkan terjadinya benturan dengan ideologi yang sudah mapan dan mengakar kuat di bumi Indonesia yang mayoritas Sunni bermazhab Syafi'i, suku bangsa yang heterogen dan budaya yang majemuk. Oleh karena itu, kehadiran Syi'ah di tanah air ini tidak sepi dari hujatan dan tuntutan terhadap pembubaran Syi'ah yang menggema, baik lokal maupun nasional. Gugatan secara lokal misalnya dilakukan oleh umat Islam Pekalongan tempat berdirinya pondok Pesantren Al-Hadi. Umat Islam Pekalongan menamakan gugatan itu dengan Resolusi Umat Islam Terhadap Ajaran Syi'ah yang berisi: *Pertama*, menutup serta menghentikan segala bentuk aktivitas pondok pesantren Al-Hadi yang terletak di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Klego, gang VI Nomor 4, Pekalongan. *Kedua*, mengadili Ahmad Baraqbah (tokoh Syia'h Pekalogan) ke Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai pelaku yang menikahkan warga secara liar. *Ketiga*, mengawasi dan melarang segala bentuk gerakan dan aktivitas Syi'ah di Pekalongan. *Keempat*, mengusulkan kepada pemerintah pusat agar dalam GBHN mendatang agama Islam dipertegas yaitu menjadi Islam Ahlus Sunnah wa al-Jama'ah. Resolusi ini dikeluarkan oleh Yayasan Ashabul Kahfi yang terletak di Jalan WR Supratman Undang 11, Pekalongan Oktober 1992. Resolusi yang sama juga dikeluarkan oleh Forum Silaturrahmi Umat Islam Pekalongan yang beralamat di Jalan Podosugih 7/21, Pekalongan tanggal 19 Oktober 1992. Resolusi itu ditandatangani oleh berbagai pihak yang menolak kehadiran Syi'ah dan menginginkan penutupan pondok pesantren al-Hadi yang dianggap sebagai pusat penyebaran ajaran Syi'ah di Pekalongan.¹⁵

¹⁵M. Hamdan Basyar, *Agama, Politik dan Pembangunan, Syi'ah Dalam*

Jauh sebelum kasus pembakaran pondok pesantren al-Hadi di Kabupaten Batang, hujatan terhadap Syi'ah sudah menyebar keseluruh penjuru tanah air melalui berita dalam berbagai media massa cetak, sebut saja misalnya permintaan agar pemerintah segera mencabut tujuh yayasan Syi'ah (*Pelita* 22 September 1997), Syi'ah digoyang lagi (*Media Indonesia* 5 Oktober 1997), Ramai Menolak Syi'ah (*Tiras* 6 Oktober 1997), Hajatan Untuk Menghujat Syi'ah (*Gatra* 11 Oktober 1997), Syi'ah dihujat dan diharamkan (*Peron* 18 Oktober 1997). Tulisan tentang Syi'ah sebagai penyusupan Kepalsuan Doktrin Imamah Syi'ah, Syi'ah mempropagandakan umat Islam, Syi'ah Millah tersendiri meresahkan dan Mut'ah itu haram dan meresahkan pernah dimuat dalam Majalah *Media Dakwah* tahun 1997.¹⁶

Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, Syi'ah tidak menampakan diri secara fisik mereka lebih memilih menggunakan *taqiyah* sebagai salah satu strategi agar dapat diterima oleh umat Islam Indonesia. Tetapi kemudian, sejak era reformasi yang sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya pemahaman Islam yang semakin kuat dan munculnya gerakan Islam fundamentalis dan Salafi yang memperjuangkan Islam yang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagaimana yang diamalkan para salafus saleh melalui organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, Forum Pembela Islam dan lain-lain, maka kemunculan Syi'ah secara fisik mendapat penolakan yang cukup keras.

Mengerasnya penolakan terhadap Syi'ah Indonesia sejalan dengan gerakan Salafiyah yang tumbuh pada tahun 1980-an dan semakin menguat pada era reformasi baik yang berorientasi keagamaan murni, maupun politik yang cenderung radikal, karena

Kehidupan Politik Umat Islam, (Jakarta: PPW-LIPI, 1999), hlm. 111-112.

¹⁶M. Hamdan Basyar, *Agama, Politik dan Pembangunan, Syi'ah*, hlm. 82.

para pengikutnya terkadang melakukan aksi-aksi yang bersifat merusak dan menghancurkan segala hal yang menurut mereka tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti menghancurkan tempat-tempat maksiat. Gerakan-gerakan Salafiyah yang berkembang pada era tahun 1980-an dan 1990-an di Indonesia, berusaha untuk memahami dan menjalankan akidah dan praktik hidup Islam mengikuti Nabi serta generasi *Salaf al-Shalih* dengan sebenarnya. Sebagaimana gerakan Salafiyah Muhammadiyah dan lain-lain pada awal abad ke-20 yang menggelorakan kembali pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta menentang segala bentuk syirik, bid'ah, takhayul, dan khurafat.¹⁷ Namun, gerakan Salafiyah era baru tersebut memiliki ciri sebagai berikut: *Pertama*, lebih menekankan pada penegakan syariat Islam secara formalistik daripada perhatian terhadap masalah lainnya. *Kedua*, Kendati menggunakan simbol Ahlus Sunnah, kelompok ini cenderung memandang Nahdlatul Ulama yang juga menganut paham Ahlussunnah Waljamaah sebagai ahli bid'ah, bahkan juga Muhammadiyah. *Ketiga*, memiliki sifat radikal atau termasuk dalam kategori fundamentalisme Islam, walaupun lebih condong pada fundamentalisme skripturalis, karena lebih menekankan pada paham dan praktik keagamaan yang murni dan keras. *Keempat*, karena wataknya yang formalistik dan fundamentalistik, maka selain bergerak di bidang dakwah, terdapat kecenderungan gerakan Salafiyah ini memasuki gerakan politik, artinya tidak semata-mata gerakan keagamaan. *Kelima*, mengambil corak gerakan (harakah) selain dakwah murni sebagai gerakan murni keagamaan, karena itu Salafi yang bercorak dakwah ini menolak atau tidak memasuki wilayah politik termasuk dalam menggagas negara Islam atau Khilafah Islam sebagaimana dilakukan Hizbut Tahrir dan Majelis

¹⁷ Haedar Nashir, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), hlm. 169.

Mujahidin Indonesia. *Keenam*, cara mempraktikkan Islam sangat dipengaruhi Wahabi (Wahabiyyah) yang mementingkan pemurnian secara skriptural, menolak segala bentuk takhayul, bid'ah, dan khurafat, dan menolak pembaruan, sehingga sering berhadapan dengan arus-utama Islam di negeri ini.¹⁸

Melalui sebuah tim yang diprakarsai Majelis Ulama Indonesia Pusat telah melakukan penelitian dan kajian terhadap Syi'ah yang kemudian diterbitkan dalam buku dengan judul *Mengenal dan Mewaspada Penyimpangan Syi'ah di Indonesia*. Penolakan yang didasarkan kajian dan musyawarah Badan Silaturrahi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) tanggal 3 Januari 2012 di gedung Islamic Centre Pamekasan Madura terungkap bahwa terdapat beberapa keyakinan Syi'ah Imamiyah yang menyimpang dari prinsip-prinsip Islam berdasarkan kriteria aliran sesat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)¹⁹ yaitu: *Pertama*, rukun Iman dan rukun Islam Syi'ah berbeda dari nas-nas al-Qur'an dan hadis Mutawatir dan sahih karena menambahkan rukun *al-Wilayah* (keimaman Ali ibn Abi Thalib dan keturunannya) sebagai bagian dari rukun Iman dan Islam. *Kedua*, meyakini adanya *Tahrif* (Interpolasi) al-Qur'an yang berarti mengingkari autensitas dan kebenaran al-Qur'an, *Ketiga*,

¹⁸ Haedar Nashir, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis.....*, hlm. 170.

¹⁹ Kriteria aliran sesat menurut MUI adalah: *Pertama*, mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam. *Kedua*, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i (al-Qur'an dan as-Sunnah). *Ketiga*, meyakini turunnya wahyu sesudah al-Qur'an. *Keempat*, mengingkari autensitas dan kebenaran al-Qur'an. *Kelima*, menafsirkan al-Qur'an tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. *Keenam*, mengingkari kedudukan Hadis sebagai sumber ajaran Islam. *Ketujuh*, melecehkan/mendustakan Nabi dan Rasul. *Kedelapan*, mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. *Kesembilan*, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang tidak ditetapkan syari'ah. *Kesepuluh*, mengkafirkan sesama muslim hanya karena bukan kelompoknya, dalam MUI, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 46.

mengkafirkan kelompok lain yang berada diluar golongan Syi'ah karena prinsip mereka adalah seorang yang tidak mengimani rukun Iman dan Islam yang paling pokok yaitu *al-Wilayah*, maka dianggap bukan muslim, fasik, bahkan kafir, baik umat Islam umumnya maupun para sahabat Nabi yang utama, yaitu Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar Ibn Khattab dan Utsman Ibn Affan dan semua yang bersepakat membaiat mereka.²⁰ Oleh karena itu, MUI Jawa Timur mengeluarkan Fatwa Nomor Kep-01/SKF-MUI/JTM/2012 tanggal 21 Januari 2012 yang mengukuhkan dan menetapkan sejumlah keputusan MUI Daerah yang menyatakan bahwa ajaran Syi'ah Imamiyah atau Itsna Asyariah (mazhab Ahlulbait) serta ajaran-ajaran yang mempunyai kesamaan dengan paham Syi'ah Imamiyah atau Itsna Asyariah adalah sesat dan menyesatkan, dan penggunaan istilah *Ahlulbait* untuk pengikut Syi'ah adalah bentuk pembajakan kepada *Ahlulbait* Rasulullah.

Oleh karena paham Syi'ah yang menolak hadis yang tidak diriwayatkan oleh *Ahlulbait*, memandang imam itu maksum, tidak mengakui ijmak tanpa imam, memandang bahwa menegakkan kepemimpinan (pemerintah) adalah termasuk rukun agama, tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman r.a adalah menyimpang dan harus diwaspadai.²¹

Perkembangan Syi'ah di Indonesia karena besarnya perhatian pemerintah Iran dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, MUI meminta kepada pemerintah RI untuk membatasi kerjasama hanya dalam bidang politik dan ekonomi-perdagangan. Perlunya segera diambil kebijakan politik oleh pemerintah RI untuk menghentikan lajunya perkembangan Syi'ah di Indonesia yang telah meresahkan umat Islam di

²⁰Tim Penulis MUI Pusat, *Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syi'ah di Indonesia*, (Jakarta: Formasi, 2013), hlm. 121-122.

²¹Himpunan Fatwa MUI sejak....., hlm. 46.

Indonesia yang berpotensi mengancam stabilitas negara dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.²²

Penolakan yang dilakukan oleh kelompok umat Islam Sunni mewujud dalam bentuk konfrontatif seperti kerusuhan, demonstrasi, perkelahian, dan perusakan. Bahkan di beberapa daerah kebencian yang memuncak pada konflik (Kasus Situbondo dan Sampang Madura) telah menimbulkan korban harta dan nyawa.

Puncak perlawanan terhadap Syi'ah telah melahirkan suatu gerakan Aliansi Nasional Anti Syi'ah (ANNAS) yang dideklarasikan di Bandung. Berbagai elemen masyarakat dan ormas-ormas Islam seluruh Indonesia bergabung dalam aliansi ini yang menuntut dikeluarkannya fatwa sesat terhadap Syi'ah oleh MUI pusat dan menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk melarang ajaran Syi'ah dan membubarkan ormas Syi'ah secara nasional.²³

Bahkan di Bondowoso, Yayasan *al-Bayyinat* Indonesia yang berpusat di Surabaya menyerukan kepada umat Islam agar bersikap tegas terhadap penganut Syi'ah dengan mengucilkan dan memboikot mereka dengan cara: *Pertama*, tidak menyalati dan menguburkan jika orang Syi'ah meninggal. *Kedua*, tidak menjadikan orang Syi'ah sebagai imam. *Ketiga*, tidak menikah dengan orang Syi'ah. *Keempat*, tidak bergaul (duduk-duduk) bersama orang Syi'ah (Jangan menghadiri undangan mereka). *Kelima*, tidak menjenguk orang Syi'ah, apabila mereka dalam

²²Tim Penulis MUI Pusat, *Mengenal dan Mewaspada*....., hlm. 131.

²³ Abdul Chair Ramadhan, *Membangun Politik Hukum Sistem Ketahanan Nasional Terhadap Ancaman Ekspansi Ideologi Transnasional Syi'ah Iran*, (Surakarta: Disertasi Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum UNS, 2015, Tidak diterbitkan), hlm.138.

keadaan sakit. Seruan ini tersebar di seluruh wilayah Bondowoso, Jawa Timur.²⁴

Walaupun banyak penolakan terhadap keberadaan Syi'ah melalui berbagai gerakan penentangan yang dilakukan oleh umat Islam (Sunni) bahkan secara resmi melalui organisasi masyarakat yaitu MUI secara nasional telah mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Syi'ah, namun Syi'ah tetap eksis bahkan cenderung mengalami perkembangan.²⁵ Akan tetapi, mengapa Syi'ah tetap eksis dalam sistem politik keagamaan di Indonesia dan bahkan justru Syi'ah terlihat semakin maju dan berkembang dan bagaimana Syi'ah Indonesia mempertahankan eksistensinya dalam sistem politik keagamaan di Indonesia. Masalah Syi'ah ini menarik untuk diteliti karena ada fase baru penolakan terhadap Syi'ah yaitu munculnya fatwa MUI Jawa Timur dan MUI Pusat tentang bahaya Syi'ah, sehingga perlu diwaspadai oleh umat Islam beraliran Sunni.

Eksistensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, eksistensi dalam ajaran atau paham keagamaan. *Kedua*, eksistensi dalam kelembagaan atau organisasi. *Ketiga*, eksistensi dalam keanggotaan atau pengikut. *Keempat*, eksistensi dalam aktivitas atau kegiatan.

²⁴ Wahid Sugiyarto, (Editor), *Direktori Kasus-Kasus Aliran, Pemikiran, Paham, dan Gerakan Keagamaan di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010), hlm. 39.

²⁵ Indikasi perkembangan Syi'ah adalah banyak yayasan yang berdiri, penerbitan, lembaga pendidikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai dasar pijak yang akan dicarikan jawabannya melalui penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Mengapa dan dalam aspek apa saja Syi'ah eksis dan berkembang di tengah mayoritas penganut Sunni dalam konstelasi politik keagamaan di Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana gerakan Syi'ah mempertahankan eksistensinya dalam konstelasi politik keagamaan di Indonesia?
- 1.2.3 Bagaimana dinamika pergulatan Syi'ah dalam mempertahankan eksistensinya dalam konstelasi politik keagamaan di Indonesia?
- 1.2.4 Bagaimana Syi'ah dalam sistem politik Indonesia dan praktik politik keagamaan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan:

- 1.3.1 Faktor-faktor penyebab Syi'ah eksis dalam konstelasi politik keagamaan Indonesia dan aspek Syi'ah yang eksis.
- 1.3.2 Usaha Gerakan Syi'ah mempertahankan eksistensinya dalam konstelasi politik keagamaan di Indonesia.
- 1.3.3 Dinamika pergulatan Syi'ah mempertahankan eksistensinya dalam konstelasi politik keagamaan di Indonesia.
- 1.3.4 Syi'ah dalam sistem politik Indonesia dan praktik politik keagamaan di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

- 1.4.1 Sebagai sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya khazanah kepustakaan politik Islam.

- 1.4.2 Sebagai *islamic injunctions* bagi problematika politik umat Islam dan wawasan terhadap upaya memahami gejala sosial dan politik umat Islam sepanjang sejarahnya sebagai rekonstruksi sejarah pemikiran politik Syi'ah dan gerakan Syi'ah dalam sistem politik keagamaan di Indonesia.
- 1.4.3 Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi penulisan yang komprehensif tentang sejarah Syi'ah di Indonesia.
- 1.4.4 Diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta sejarah baru mengenai dinamika gerakan keagamaan dan pemikiran Islam di Indonesia dengan melihat kasus Syi'ah.
- 1.4.5 Diharapkan sebagai penyempurnaan terhadap hasil penelitian sebelumnya tentang Syi'ah yang bisa dijadikan modal untuk penelitian lebih lanjut.

1.5 Kajian Pustaka

Penelitian tentang Syi'ah telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan sudut pandang dan penekanan substansi yang beragam perspektif, misalnya perspektif pemikiran, ideologi dan politik. Penelitian tersebut baik dalam bentuk tesis, disertasi maupun penelitian lepas yang pernah dilakukan sangat penting untuk dikemukakan dalam penelitian ini untuk menunjukkan spesifikasi penelitian yang sedang dilakukan ini.

Beberapa penelitian tentang Syi'ah dimaksud disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Klaster	Judul	Penulis/ Peneliti	Hasil
1.	Politik	Syi'ah dan Politik di Indonesia	Puslitbang Politik dan Kewilayahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPW-LIPI) ²⁶	Bahwa perkembangan Syi'ah di Indonesia tidak lepas dari kesuksesan revolusi Iran tahun 1979. Proses perkembangan Syi'ah terutama tampak dikalangan muda muslim. Realitas kehidupan Syi'ah menunjukkan bahwa orang-orang Syi'ah tidak merasa menjadi minoritas di Indonesia. Syi'ah meyakini bahwa imamah bukan saja kepemimpinan masyarakat atau politik, melainkan juga bermakna sebagai kepemimpinan religius. Secara global keberhasilan revolusi Iran berpengaruh pada dunia Islam, khususnya dalam membangkitkan semangat Pan Islamisme. Dunia Islam selama ini tidak pernah berada pada posisi puncak
2.	Sosial	Kekerasan Terhadap Kelompok Ikatan Jamaah Ahlul Bait	Imam Syaukani ²⁷	1. Bahwa resistensi terhadap IJABI khususnya kasus Jambesari merupakan puncak akumulasi ketidaksenangan masyarakat Bondowoso

²⁶M. Hamdan Basyar (Koord), *Agama, Politik dan Pembangunan.....*, hlm. 115.

²⁷ Wakhid Sugiyarto (Editor), *Direktori Kasus-kasus Aliran, Pemikiran, Paham, dan Gerakan Keagamaan di Indonesia.....*, 2010.

No	Klaster	Judul	Penulis/ Peneliti	Hasil
		Indonesia (IJABI) di Bondowoso Jawa Timur, pada tahun 2007		<p>terhadap keberadaan Syi'ah,</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ketidakterus terangan penganut Syi'ah dan kurangnya informasi yang benar tentang Syi'ah 3. Masyarakat mudah terprovokasi terhadap upaya untuk melecehkan agama, sehingga harus dilawan dengan kekerasan 4. Kurangnya peran mediasi MUI dan Kementerian Agama dalam mengayomi masyarakat yang berbeda keyakinan.
3.	Sosial	Syi'ah menjadi problem baru di Indonesia setelah ratusan tahun hidup bersama	Moh. Hasim (2012) ²⁸	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Syi'ah adalah paham keagamaan yang menyandarkan pada pendapat Sayyidina Ali (khalifah keempat) dan keturunannya yang muncul sejak awal pemerintahan <i>Khulafa al-Rasyidin</i>. Syi'ah berkembang menjadi puluhan aliran-aliran karena perbedaan dalam mengangkat imam. 2. Perkembangan Syi'ah di Indonesia melalui empat tahap yaitu: <i>Pertama</i>, bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia. <i>Kedua</i>, pasca

²⁸ Moh. Hasim, "Syi'ah: Sejarah Timbul dan Perkembangannya di Indonesia"..... 2012.

No	Klaster	Judul	Penulis/ Peneliti	Hasil
				<p>revolusi Islam Iran. <i>Ketiga</i>, melalui intelektual Islam Indonesia yang belajar di Iran. <i>Keempat</i>, tahap keterbukaan melalui pendirian organisasi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia.</p>
4.	Sosial	Geliat Syi'ah, Perubahan Paham dan Perilaku Keagamaan Mahasiswa Muslim di Makassar tahun 2012	Sabara ²⁹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umumnya mahasiswa muslim di Makassar mengenal Syi'ah melalui kajian-kajian dan buku-buku yang bertemakan Syi'ah. 2. Acara-acara serimonial yang diadakan oleh kalangan Syi'ah dan melalui interaksi dengan kawan atau kerabat penganut Syi'ah. 3. Respon positif mahasiswa adalah menjadi penganut Syi'ah dan adapula yang merespon positif tetapi tidak secara langsung memilih Syi'ah sebagai mazhab. 4. Ada pula yang bersikap negatif dengan berpandangan stigmatik terhadap Syi'ah secara umum sebagai aliran sesat dan menyimpang dari ajaran Islam.

²⁹ Sabara, "Geliat Syiah, Perubahan Paham dan Perilaku Keagamaan".....2012.

No	Klaster	Judul	Penulis/ Peneliti	Hasil
				<p>5. Kaderisasi dilakukan oleh IJABI dan sembilan yayasan Syi'ah di kota Makassar dan beberapa kelompok studi yang menjadikan mahasiswa sebagai sasaran.</p> <p>6. Penanaman paham dan perilaku keagamaan Syi'ah menggunakan pendekatan intelektual melalui kajian dan diskusi, pendekatan spiritual melalui acara-acara doa-doa pada malam-malam tertentu. Juga menggunakan pendekatan ideologis dengan melakukan transformasi semangat revolusi Islam Iran tahun 1979.</p>
5.	Budaya	Strategi Budaya Taqiyah: Dilema Penyembunyian Identitas dalam Perkembangan Syi'ah	M.Alie Humaedi ³⁰	Bahwa sebagai gerakan regional yang bertumpu pada gerakan kesadaran dan pencerahan intelektual, Syi'ah lebih memiliki peluang untuk diterima oleh masyarakat Indonesia. Karena terdapat banyak kesamaan kultur dalam praktik peribadahan dengan sebagian besar umat Islam Indonesia. Apalagi melalui politik identitas Syi'ah yang

³⁰ M. Alie Humaedi, "Strategi Budaya Taqiyah: Dilema Penyembunyian Identitas dalam Perkembangan Syiah", (Jakarta: Harmoni, Jurnal Multikultural dan Multireligius, volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012).

No	Klaster	Judul	Penulis/ Peneliti	Hasil
				diwujudkan melalui <i>taqiyah</i> , yang tidak mengharuskan pembentukan masyarakat Syi'ah, <i>wilayatul faqih</i> dan <i>imamah</i> secara internasional. Sebaliknya penerimaan gerakan politik keagamaan <i>transnasional Islamic movement</i> banyak mendapat tantangan kuat dari sebagian besar masyarakat, khususnya tentang konsep khilafah, jihad dan konsep negara Islam. Oleh karena itu, dengan kecenderungan yang demikian, maka Syi'ah sebagai gerakan Islam regional dapat menjadi kekuatan penyeimbang gerakan Islam transnasional. Setidak-tidaknya ide dan praktik mekanisme politik Negara-agama yang berpeluang menghancurkan nilai-nilai agama itu sendiri dapat dicegah lebih awal.
6.	Sosial-Keagamaan	Gerakan Keagamaan IJABI di Bandung untuk disertasi Program Pascasarjana	Achmad Muchaddam Fahhan. ³¹	IJABI merupakan gerakan keagamaan di Bandung, Jawa Barat yang bersifat <i>reformatif-inklusif</i> yang berupaya mengubah persepsi masyarakat tentang mazhab Syi'ah. Sifat inklusifnya terdapat pada sikap toleransinya terhadap mazhab

³¹Achmad Muchaddam Fahhan, *Gerakan Keagamaan IJABI di Bandung*, (Yogyakarta: Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Tahun 2013, tidak diterbitkan), hlm. 280-282.

No	Klaster	Judul	Penulis/ Peneliti	Hasil
		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013		Sunni yang dianggap absah sehingga perlu diajak bekerjasama. Sebagai gerakan yang memperjuangkan Islam mazhab <i>Ahlulbait</i> , IJABI menggunakan strategi pemberdayaan <i>mustad'afin</i> dan strategi pencerahan intelektual dalam bentuk kajian-kajian keagamaan, diskusi ilmiah seputar filsafat Islam dan doktrin Ahlul bait. ³²

Kajian tentang Syi'ah yang dilakukan para peneliti sebagaimana diuraikan di atas, jika dibandingkan baik substansi maupun perspektifnya dengan penelitian yang akan dilakukan dengan judul *Dinamika Gerakan Syi'ah Dalam Mempertahankan Eksistensinya Dalam Konstelasi Politik Keagamaan di Indonesia* benar-benar berbeda dan secara spesifik memang belum ada yang melakukan penelitian baik dari segi judul maupun isinya. Penelitian ini termasuk klaster politik.

1.6 Kerangka Teori

Untuk melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini diperlukan teori. Teori digunakan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan, meramalkan dan mengendalikan data untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Seorang ahli sosiologi Jonathan H. Tunner merumuskan bahwa sebuah teori dibangun sebagai aktivitas intelektual yang disebut ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan yakni:

³²Achmad Muchaddam Fahhan, *Gerakan Keagamaan.....*, hlm. 280-282.

- 1.6.1 Mengklasifikasi dan mengorganisasikan peristiwa-peristiwa di dunia sehingga dapat ditempatkan pada perspektif tertentu.
- 1.6.2 Untuk menjelaskan sebab terjadinya peristiwa masa lampau dan meramalkan kapan, dimana dan bagaimana peristiwa dimasa datang akan terjadi.
- 1.6.3 Untuk meramalkan sebuah pengertian secara naluriiah memuaskan mengenai mengapa dan bagaimana peristiwa dapat terjadi.³³

Teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis,³⁴ atau seperangkat pernyataan yang berhubungan secara sistematis,³⁵ seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena,³⁶ serangkaian proposisi yang saling berhubungan yang dapat digunakan untuk menerangkan dan memprediksi kehidupan sosial.³⁷ Oleh karena itu, penelitian Dinamika Gerakan Syi'ah Mempertahankan Eksistensinya dalam Sistem Politik Keagamaan di Indonesia ini akan menggunakan teori ideologi politik, teori konflik, teori gerakan politik dan sosial serta teori sistem politik yang akan dibahas secara singkat.

³³ Kamanto Sunarto, (Peny), *Pengantar Sosiologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 53-54.

³⁴Wiliam Wiersma, *Research Methods in Education: AnInterduction*, Fourth Edition: Allyn and Bacon Inc; (Boston, London, Sydney Toronto: 1986), hlm. 105.

³⁵Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 4.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitati, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 80.

³⁷Sunyoto Usman, *Sosiologi: Sejarah Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: CIREd, 2004), hlm. 59.

1.6.1 Ideologi Politik

Ideologi ialah gagasan umum yang berpengaruh terhadap tingkah laku manusia dalam situasi khusus. Prinsip tingkah laku individu dalam hubungannya dengan masyarakat.³⁸ Ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana sebaiknya yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku mereka bersama dalam berbagai segi kehidupan dunia.³⁹ Ideologi secara luas menurut Franz Magnis Suseno adalah cita-cita, nilai-nilai dasar, keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif, dan dalam arti sempit ideologi adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak.⁴⁰ Ideologi adalah keseluruhan prinsip dan norma yang berlaku dalam masyarakat meliputi aspek sosial, politik, budaya dan pertahanan keamanan yang merupakan motivasi dalam bertindak. Ideologi menentukan tingkah laku kehidupan sosial, ekonomi dan politik.⁴¹ Ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku

³⁸David E. Apter, *Politik Modernisasi*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 327.

³⁹Yahya Muhaimin dan Colin Mac Andrews, *Masalah-Masalah Pembangunan Politik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 88.

⁴⁰ Franz Magnis Suseno, dalam Ali Maksum (Peny.), *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme*, (Malang: PuSAPoM, 2007), hlm. 1.

⁴¹ Soejanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosial Budaya*, (Jakarta: PT Gramedia, 1994), hlm. 179.

sekelompok manusia dalam bidang sosial, politik dan kebudayaan.⁴²

Menurut Kaelan, ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa. Keberadaan ideologi bagi suatu bangsa sangat penting karena: *Pertama*, ideologi dapat membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuan melalui berbagai realisasi pembangunan. *Kedua*, ideologi merupakan sumber motivasi, inspirasi dan semangat bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. *Ketiga*, ideologi dapat menciptakan semangat persatuan dan kesatuan hidup bersama dalam suatu masyarakat bangsa dan bernegara.⁴³

Urgensinya ideologi bagi suatu bangsa karena memiliki fungsi:

- a. Struktur kognitif yang berarti keseluruhan pengetahuan yang dapat dijadikan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian alam.
- b. Orientasi dasar yang memberikan makna dan menunjukkan tujuan kehidupan manusia.
- c. Norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
- d. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitas dirinya.
- e. Kekuatan untuk menyemangati dan mendorong seseorang untuk melaksanakan kegiatan mencapai tujuan.

⁴² Soerjono Soemargono, dalam Kaelan, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 1996), hlm. 52.

⁴³ Ali Maksun (Peny.), *Pendidikan Kewarganegaraan.....*, hlm. 4.

- f. Pendidikan bagi masyarakat untuk memahami, menghayati tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma yang terkandung di dalamnya.⁴⁴

Ada tiga dimensi ideologi menurut Alfian yang harus ada dalam setiap ideologi sebagai tolak ukur kualitas suatu ideology, yaitu dimensi idealisme, dimensi realitas dan fleksibilitas.⁴⁵ *Pertama*, idealisme adalah suatu ideologi yang merupakan gambaran tentang sejauhmana suatu masyarakat berhasil memahami dirinya dan memiliki kemampuan memberikan harapan-harapan kepada berbagai kelompok masyarakat untuk mempunyai kehidupan bersama yang lebih baik dan maju. Dimensi idealisme ini sebagai penggerak untuk melakukan sesuatu yang lebih produktif. Idealisme itu akan menjelma menjadi cita-cita seperti nasionalisme, keadilan sosial, demokrasi dan kemanusiaan. *Kedua*, dimensi realitas yakni suatu ideologi yang lahir dan hidup dalam masyarakat yang dipahami berdasarkan kemampuan intelektual yang tinggi sehingga memiliki relevansi yang kuat dengan jiwa dan kehidupan masyarakatnya. *Ketiga*, dimensi fleksibilitas yakni suatu dimensi yang memiliki kemampuan mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Mempengaruhi berarti ikut mewarnai proses pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan menyesuaikan berarti bahwa masyarakat menemukan interpretasi-interpretasi baru terhadap nilai dasar dari ideologi itu. Fleksibilitas ideologi membuka

⁴⁴ Poespowardojo, dalam, Ali Maksum (Peny.), *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, ...*, hlm. 4.

⁴⁵ Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1978), hlm. 88-89.

kesempatan kepada generasi baru untuk memberikan tafsir baru sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, suatu perubahan dapat dilakukan dalam setiap sejarah kehidupan manusia agar ideologi yang dimiliki oleh masyarakat tetap bertahan sehingga dapat menjadi rujukan generasi baru dalam menata kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Dalam perspektif pemikiran para intelektual, bahwa suatu ideologi setidaknya-tidaknya mempunyai lima komponen dasar yaitu:

- a. Suatu ideologi itu mempunyai nilai. Setiap ideologi berakar pada pendirian bahwa nilai mempunyai kedudukan sangat penting dan kriteria nilai yang baik selalu mempertimbangkan terhadap idea, keyakinan dan tindakan untuk mewujudkannya.
- b. Ideologi mempunyai visi tentang politik yang ideal. Setiap ideologi diilhami oleh visi yang menggambarkan bagaimana realisasi suatu politik yang dikelola dengan cara baik.
- c. Suatu ideologi harus mengandung suatu konsepsi tentang sifat manusia yang berisi tentang keyakinan mengenai apa yang akan diperbuat oleh manusia.
- d. Suatu ideologi mempunyai *strategy for action*. Suatu ideologi harus bisa dioperasionalkan. Oleh karena itu, suatu ideologi dalam politik harus mempunyai strategi untuk melaksanakannya.
- e. Suatu ideologi mempunyai taktik sebagai kelanjutan dari strategi. Oleh karena itu, suatu ideologi harus mempunyai politik taktik.⁴⁶

⁴⁶ Austin Rany, dalam Miftah Thoha, *Birokrasi Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 83-86.

Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide-ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang yang digunakan untuk menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problem politik yang dihadapinya dan menentukan tingkah laku politiknya. Dasar dari ideologi politik adalah keyakinan akan adanya pola tata-tertib sosial politik yang ideal.⁴⁷ Dalam ideologi politik terdapat prinsip-prinsip yang menurut Glibert Abcarian adalah: *Pertama, Perceptual selectivity* yaitu kecenderungan ideologi hanya melihat beberapa aspek kekuasaan politik secara terbatas dan tidak melihatnya dari segi yang menyeluruh. *Kedua, Relationality* yang menunjukkan apakah ideologi tersebut cenderung mempertahankan status quo atau berorientasi pada sistem baru. *Ketiga, Scriptualism* yaitu pemikiran-pemikiran politik sudah dibakukan yang memuat kebenaran yang harus diikuti. *Keempat, Normativ attitude* yaitu norma-norma dasar ideologi politik sudah teruji yang menumbuhkan perasaan keterlibatan para penganutnya. *Kelima, Transcendentalism* yaitu suatu ideologi politik yang mengandung nilai-nilai transendental untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.⁴⁸ Ideologi mengarahkan seseorang atau kelompok orang baik yang tergabung dalam politik, ekonomi, sosial budaya atau keagamaan untuk melakukan tindakan-tindakan apapun akan selalu diorientasikan kepada sistem kepercayaan yang dianut.

⁴⁷Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 32.

⁴⁸Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), hlm. 120-123.

Dalam politik, ideologi berfungsi sebagai pembimbing ideal untuk melakukan tindakan politik yang diyakini kebenarannya baik sebagai tujuan yang ingin dicapai maupun sebagai landasan yang harus diperjuangkan. Setiap partai politik mempunyai komitmen dan kepentingan terhadap ideologi yang diusung bahkan dengan ideologi dapat dijadikan pembedaan antara partai politik yang satu dengan partai politik yang lainnya. Tujuan-tujuan yang dicapai dan bidang garapnya disesuaikan dengan ideologi. Demikian juga tiap-tiap negara memiliki ideologi sebagai pemersatu pluralitas bangsanya untuk mencapai suatu tujuan.⁴⁹

Fungsi ideologi dalam kegiatan politik menurut Herbert Feith seperti dikutip Albert Widjaya adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan tujuan politik sebagai petunjuk mengenai jalan benar dan salah dalam menuju sasaran tersebut.
- b. Memobilisasi dan mengatur dukungan dan partisipasi massa dalam mencapai tujuan yang ditentukan para elit.
- c. Menciptakan wadah konsensus untuk menyatukan partai-partai yang berbeda ideologinya maupun bermacam tradisi suku-suku bangsa.
- d. Menggunakan landasan bersama di atas untuk memperkuat legitimasi pemerintah dan membangkitkan dukungan sukarela serta kepercayaan masyarakat untuk mengurangi cara paksaan dan represi dalam pembinaan masyarakat.

⁴⁹ Sudarno Sobron, *Dinamika Gerakan Politik HTI Mewujudkan Khilafah al-Islamiah dalam Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Disertasi UMY 2012 tidak diterbitkan), hlm. 22.

- e. Memelihara dukungan para pengikut (terutama pejabat, militer dan anggota partai) agar dapat melawan ideologi saingan dari partai lain atau kelompok yang lain secara efektif.
- f. Menghadapi sinisme dan kekecewaan di antara mereka yang pesimis terhadap ketidakstabilan politik dan kemerosotan ekonomi yang terus menerus.⁵⁰

Ada pendapat lain tentang fungsi ideologi bagi suatu bangsa yaitu:

- a. Sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian di alam sekitarnya.
- b. Sebagai orientasi dasar yang memberikan makna dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
- c. Sebagai norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
- d. Sebagai bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
- e. Sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dalam mencapai tujuan.
- f. Sebagai pendidikan bagi seseorang atau bangsa untuk memahami serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.⁵¹

1.6.2 Teori Konflik

Sebelum membahas teori konflik terlebih dahulu akan dipaparkan sedikit tentang dinamika sebagai bagian dalam

⁵⁰Albert Widjaya, *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 36-37), lihat juga M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik.....*, hlm. 130.

⁵¹Tim, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: UPT MKU UNY, 2006), hlm. 117.

judul disertasi ini. Dinamika berasal dari bahasa Inggris *dynamic* yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan gerak kemajuan,⁵² yaitu pergeseran, perubahan atau perkembangan. Kemajuan memiliki pengertian yang luas dan relatif. Kadang-kadang kemajuan didahului atau diikuti oleh perubahan, pergeseran, pemunculan sesuatu yang baru dan menghapus (menghilangkan) unsur yang lama. Dinamika dalam judul ini dimaksudkan adalah pergeseran yang bergerak ke arah suatu perubahan dalam perjuangan mempertahankan eksistensi kelompok Syi'ah di Indonesia. Dinamika perubahan sosial dikelompokkan ke dalam dinamika dalam arti instrumentasi dan dinamika dalam arti tujuan.⁵³

Beberapa pendapat yang berkait dengan dinamika dalam arti instrumentasi adalah Emil Durkheim yang berpendapat bahwa perubahan evolusioner dari mekanik ke organik. Pembagian kerja dan tata sosial yang semula kaku, mendetail menjadi luwes. Sedangkan Homans mengetengahkan pendapat teori tukar-menukar bahwa manusia bertindak atas prinsip meminimalkan biaya dengan menjangkau keuntungan secara maksimal. Kekuatan yang dimiliki oleh orang yang mampu memberi hadiah lebih besar dalam tukar-menukar dengan kesediaan menerima imbalan yang lebih kecil.⁵⁴

Untuk mengkaji hubungan antar komponen dalam kehidupan masyarakat dikenal dengan teori interaksi sosial dalam sosiologi. Interaksi sosial merupakan hubungan-

⁵² Peter Salim, *The Contemporary English Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 1986), hlm. 573.

⁵³ Noeng Muhadjir, *Teori Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1984), hlm. 11-12.

⁵⁴ Noeng Muhadjir, *Teori Perubahan.....*, hlm. 11.

hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan-hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia⁵⁵.

Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua individu atau lebih dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain.⁵⁶ Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama.⁵⁷ Interaksi sosial terjadi apabila terpenuhi dua syarat yaitu kontak sosial dan komunikasi.⁵⁸

Interaksi sosial dapat berlangsung dalam berbagai bentuk yaitu:

- a. *Co-operation* yaitu interaksi sosial dalam bentuk kerjasama yaitu kerjasama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama.
- b. *Assimilation* (asimilasi) merupakan interaksi sosial melalui usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok manusia juga mempertinggi kesatuan tindakan untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama. Dalam proses asimilasi, integrasi sosial dapat dicapai karena adanya faktor-faktor: *Pertama*, toleransi terhadap perbedaan.

⁵⁵ Gillin dan Gillin, *Cultural Sociology, a revision of An Introduction to Sociology*, (New York: The Macmillan Company, cetakan ke-3, 1954), hlm. 489.

⁵⁶ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 25.

⁵⁷ Kimbal Young dan Raymond W, Mack, *Sociologi and Social Life*, (New York: American Book Company, 1959), hlm. 137.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor Dasar Interaksi Sosial dan Kepatuhan pada Hukum", *Hukum Nasional* Nomor 25, 1974, hlm. 491

Kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. *Ketiga*, sikap saling menghargai orang lain. *Keempat*, sikap terbuka terhadap kelompok yang berkuasa dalam masyarakat. *Kelima*, persamaan dalam kebudayaan. *Keenam*, perkawinan campuran. *Ketujuh*, adanya musuh bersama dari luar.⁵⁹

- c. *Contravention* pada hakikatnya adalah bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dengan pertentangan atau pertikaian, terutama ditandai adanya gejala-gejala ketidakpastian atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok orang.⁶⁰
- d. Kompetisi (*Competition*) adalah suatu proses sosial orang perorangan atau kelompok manusia bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang menjadi pusat perhatian publik dengan cara menarik perhatian publik atau mempertajam prasangka tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman. Kompetisi akan mencapai tujuan perubahan kepribadian seseorang, kemajuan, solidaritas kelompok dan disorganisasi sosial. Adalah pertentangan antara anggota atau antara kelompok dalam masyarakat yang bersifat menyeluruh yang disebabkan oleh beberapa perbedaan yaitu perbedaan individu, perbedaan pola budaya, perbedaan status sosial, perbedaan kepentingan dan terjadinya perubahan sosial.
- e. Integrasi adalah dibangunnya interdependensi yang lebih rapat antara bagian-bagian organisme hidup atau antara anggota-anggota dalam suatu masyarakat

⁵⁹Gillin and Gillin, *Cultural Sociology*....., hlm. 517.

⁶⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi keempat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 94-97.

sehingga integrasi adalah proses mempersatukan masyarakat yang cenderung membuatnya menjadi suatu kata yang harmonis yang didasarkan pada tatanan yang oleh anggota-anggotanya dianggap sama harmonisnya⁶¹. Pendekatan sosiobudaya biasanya menempatkan masyarakat dalam suasana yang selalu antagonis sehingga keragaman kelompok etnis dipandang sebagai sesuatu yang selalu hadir dan tidak bisa dihindari. Pembangunan sosial budaya selayaknya mengandung arti sebagai proses akulturasi dikarenakan nilai-nilai baru yang berkembang di masyarakat guna menuju kondisi yang lebih baik. Perbedaan-perbedaan suku, bahasa, agama dan adat merupakan ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, seharusnya tidak menjadikan suatu daerah jatuh ke dalam ketegangan budaya. Interaksi sosial antar penduduk dengan kemajemukan tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah suku agama dan ras (SARA) dan sekaligus mendorong masing-masing pihak memperkuat identitas suku dan ikatan primordialnya.⁶²

Oleh karena itu, untuk menciptakan kestabilan dalam masyarakat yang majemuk diperlukan integrasi sosial. Menurut Durkheim, norma-norma masyarakat, keyakinan dan nilai-nilai membentuk sebuah kesadaran kolektif dan kesadaran kolektif inilah yang mengikat orang secara bersama-sama untuk terciptanya integrasi

⁶¹Agus Mulyono, "Umat Beragama di Kota Batam: Antara Potensi Integrasi dan Konflik", dalam *Harmoni*, volume IX, Nomor 35 Juli-September 2010, Jurnal Multikultural dan Multi religius, hlm. 155.

⁶²Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 62.

sosial. Integrasi sosial menurut Durkheim dapat dibentuk oleh kesadaran kolektif yang ditopang oleh agama atau kepercayaan. Agama diyakini Durkheim justru dibentuk oleh kebutuhan akan integrasi sosial tersebut. Pada intinya integrasi sosial dapat terbentuk apabila telah timbul kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif tersebut timbul dari kepercayaan, nilai-nilai dan kepentingan bersama. Integrasi dapat terbentuk melalui sebuah proses: *Pertama*, interaksi yaitu proses interaksi merupakan proses paling awal untuk membangun suatu kerjasama dengan ditandai adanya kecenderungan-kecenderungan positif yang dapat melahirkan aktivitas bersama. *Kedua*, proses identifikasi. Proses interaksi dapat berlanjut menjadi proses identifikasi apabila masing-masing pihak dapat menerima dan memahami keberadaan pihak lain seutuhnya. Pada dasarnya proses identifikasi adalah proses untuk memahami sifat dan keberadaan orang lain. *Ketiga*, kerjasama. Kerjasama timbul apabila orang menyadari akan kepentingan-kepentingan yang sama, mempunyai pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui kerjasama. Derajat integrasi ditentukan oleh banyak faktor. Menurut Sorokin dan Galpin, bahwa semakin banyak faktor yang terkumpul sebagai landasan integrasi, dan menjadi pengikat, maka semakin tinggi solidaritas atau integrasi tersebut. Faktor-faktor pengikat integrasi adalah: marga, pernikahan, persamaan agama atau upacara kepercayaan, persamaan bahasa, adat, kesamaan wilayah, tanggungjawab atas pekerjaan

sama, memiliki tanggungjawab yang sama dalam mempertahankan ketertiban, pertahanan bersama, kerjasama, pengalaman, dan tindakan dalam kehidupan bersama.⁶³

- f. Akomodasi (*accomodation*) adalah suatu proses yang menunjuk pada suatu keadaan yaitu suatu kenyataan adanya suatu keseimbangan dalam interaksi antara orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia sehubungan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.⁶⁴ Akomodasi menunjuk pada usaha manusia untuk meredakan pertentangan, untuk mencapai kestabilan, mengurangi pertentangan antara orang perorang atau kelompok, mencegah meledaknya suatu pertentangan dan kadang-kadang digunakan untuk memungkinkan kerjasama antara kelompok sosial, bahkan meleburkan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah.⁶⁵
- g. Konflik (*Conflict*) adalah pertentangan antara anggota atau antara kelompok dalam masyarakat yang bersifat menyeluruh yang disebabkan oleh beberapa perbedaan yaitu: perbedaan individu, perbedaan pola budaya, perbedaan status sosial, perbedaan kepentingan dan terjadinya perubahan sosial. Konflik atau pertentangan adalah suatu proses sosial yang di dalamnya terdapat orang perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman dan kekerasan. Konflik berakar

⁶³ Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm.113.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi ...*, hlm. 95.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi...*, hlm. 95.

dari perbedaan antara orang perorang, perbedaan kebudayaan, pertentangan antara kepentingan dan perubahan-perubahan sosial.

Menurut Gamble, konflik merupakan bentrokan sikap-sikap, pendapat-pendapat, perilaku-perilaku, tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhan yang bertentangan.⁶⁶ Termasuk juga perbedaan asumsi-asumsi, keyakinan dan nilai yang dianut.⁶⁷ Menurut Weber bahwa konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial.⁶⁸ Simmel berpendapat bahwa konflik tidak dapat dielakkan dalam masyarakat. Masyarakat dipandang sebagai struktur sosial yang mencakup proses-proses *assosiatif* dan *dissosiatif* yang hanya bisa dibedakan secara analisis.⁶⁹ Konflik menurut Sigmund Freud adalah pertentangan antara dua kekuatan atau lebih yang mengandung agresivitas dan diekspresikan. Johan Galtung seorang ahli studi perdamaian mengatakan bahwa konflik adalah segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar dan penghalang itu sesuatu yang bisa dihindarkan.⁷⁰

⁶⁶ Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan, Sebuah Penelitian Sosiologis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 123.

⁶⁷ Hamidi, *Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Beragama, Perilaku Komunikasi dan Perubahan Perilaku Beragama Pimpinan Muhammadiyah di Kota Malang*, (Bandung: Tesis Universitas Pajajaran, 1995), hlm. 25.

⁶⁸ Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas*....., hlm. 15.

⁶⁹ Soejono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1993), hlm. 112.

⁷⁰ Koeswinarno dan Dudung Abdurrahman, *Fenomena Konflik Sosial di Indonesia dari Aceh sampai Papua*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Suka, 2006), hlm. 5-6.

Pengertian konflik menurut Barbara Salert adalah benturan struktur dalam masyarakat yang dinamis, antara struktur yang dominan dengan struktur yang nominal. Motifnya adalah penguasaan sumber daya dalam masyarakat baik sumber daya politik maupun ekonomi.⁷¹ Seorang pencetus teori konflik modern Ralf Dahrendorf mengemukakan bahwa asumsi dasar teori konflik antara lain: *Pertama*, bahwa setiap masyarakat dalam setiap waktu akan diatur oleh proses perubahan sosial. *Kedua*, konflik memberikan sumbangan dalam *disintegrasi* dan perubahan. *Ketiga*, dinamika masyarakat terjadi karena anggota-anggotanya berada dalam kondisi tekanan oleh pihak luar.⁷²

Suatu masyarakat dapat selalu dalam keadaan terintegrasi, stabil dan teratur karena ada nilai, norma dan aturan yang disepakati untuk dipatuhi. Oleh karena itu, agar sistem sosial masyarakat senantiasa dapat tetap *survive* (bertahan) diperlukan upaya pengkondisian yang dapat memenuhi tujuan stabilitas dan integratif. Untuk itu, menurut Parson dapat dilakukan dalam bentuk *adaptation*, *goal attainment*, *integration* dan *latensi*.⁷³

Salah satu faktor penyebab terjadinya konflik adalah perbedaan persepsi mengenai kepentingan.⁷⁴ Konflik itu terletak pada perbedaan kepentingan dan

⁷¹ Barbara Salert, *Four Theory Revolutions and Revolutionaries*, (New York: Elsevier, 1976), hlm. 2.

⁷²Ralf Dahrendorf, *Class and Conflict in Industrial Society*, (Stanford: Stanford University Press, 1959), hlm. 162.

⁷³ Peter, *Teori-Teori Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 296.

⁷⁴ Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z Rubin, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 21.

tidak tersedia alternatif yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Menurut Dahrendorf faktor yang menyebabkan terjadi konflik adalah perbedaan distribusi otoritas. Ia menjelaskan bahwa pihak yang dominan berusaha untuk mempertahankan status quo, sedangkan pihak subordinat berkeinginan untuk melakukan perubahan.⁷⁵ Konflik terjadi karena terdapat intensifikasi tekanan terhadap kelompok yang tidak dominan dan tidak ada legitimasi terhadap distribusi hak-hak dalam masyarakat.⁷⁶

Untuk lebih mudah melakukan analisis konflik perlu memperhatikan anatomi dan struktur konflik tersebut. Menurut Tomagola ada empat tata struktur anatomi konflik yaitu: *Pertama*, akar/inti permasalahan yang berperan sebagai amunisi konflik. *Kedua*, Konteks yang memfasilitasi, sehingga amunisi konflik itu terwadahi dan terfasilitasi untuk bekerja. *Ketiga*, Sumbu konflik yaitu berupa sentimen suku dan agama. *Keempat*, faktor pemicu yang dimainkan oleh para provokator lokal/internal maupun yang dari luar.⁷⁷

Adapun sumber penyebab terjadinya konflik adalah: *Pertama*, kompetisi yaitu satu usaha meraih sesuatu dengan mengorbankan pihak lain. *Kedua*, dominasi yaitu satu pihak berusaha mengatur pihak lain sehingga merasa haknya dibatasi dan dilanggar. *Ketiga*, kegagalan yang menyalahkan pihak tertentu apabila

⁷⁵ Ritzer, George & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Pustaka Media, 2003), hlm. 155.

⁷⁶ Coser, Lewis (Ed.), *The Function of Social Conflicts*, (London: Free Press of Glencoe), 1956), hlm. 143.

⁷⁷ Isre dan Moh. Saleh, (Ed.), *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Badan Litbang Depag RI, 2003), hlm. 72.

terjadi kegagalan mencapai suatu tujuan. *Keempat*, provokasi yaitu satu pihak sering menyinggung perasaan pihak lain. *Kelima*, perbedaan nilai terdapat patokan yang berbeda dalam menetapkan benar-salahnya suatu masalah.⁷⁸ Penyebab konflik menurut Anne Fox adalah kebencian pribadi, pembelaan diri, perluasan satu masalah, kurang komunikasi, budaya tertutup, ketegangan, meningkatnya keraguan, polarisasi, diskriminasi, kekerasan dan gangguan.⁷⁹

Konflik terjadi karena di dalam masyarakat terdapat kualitas otoritas yang tidak sama. Posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas pada posisi yang lain. Perbedaan distribusi sosial inilah yang mengakibatkan timbulnya konflik. Kelompok yang memegang otoritas kekuasaan dan kelompok yang mempunyai kepentingan tertentu yang mempunyai arah dan substansi berlawanan, maka apabila bertemu akan terjadi konflik.⁸⁰

Adapun teori konflik yang berakar pada pemikiran Karl Marx dan Max Weber mengasumsikan bahwa kemiskinan dan penderitaan masyarakat muncul sebagai akibat dari proses kapitalisme di dunia Barat. Oleh karena itu, apabila masyarakat ingin maju, maka harus mengambil posisi sebagai penentang kapitalism. Menurut Karl Marx konflik antara kelompok atas (pusat) dengan kelompok bawah (pinggiran) terjadi

⁷⁸ Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas*....., hlm. 16.

⁷⁹ Anne Fox, *Mengendalikan Konflik, Tips-Taktik-Teknik*, terj., Ary Kristanti, (Surabaya: Selasar Surabaya Publishing, 2009), hlm. 9.

⁸⁰ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj., Ali Mandan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 154-155.

apabila distribusi pendapatan tidak merata, meningkatnya kesadaran kelompok dan kesatuan ideologi kaum pinggiran serta semakin meluasnya polarisasi. Sedangkan Weber berpendapat bahwa konflik muncul sebagai akibat dari merosotnya legitimasi politik penguasa, meningkatnya kharisma pemimpin kelompok bawah dan hukum yang tidak berkeadilan.⁸¹

Menurut Kusnadi, dilihat dari prosesnya konflik itu terjadi dalam dua tahapan: *Pertama*, adalah tahap dis-organisasi yaitu banyak salah paham, norma tidak dipatuhi, anggota banyak menyimpang dan sanksi lemah. *Kedua*, adalah tahap dis-integrasi yaitu timbul emosi (rasa benci), suka marah (ingin memusnahkan) dan ingin menyerang. Lebih lanjut dikatakannya bahwa faktor penyebab terjadinya konflik adalah adanya perbedaan dalam berbagai aspek ada bentrokan kepentingan dan ada perubahan sosial yang tidak merata. Adapun bentuk solusi konflik yang ditawarkan adalah kompromi, toleransi, konversi, arbitrase dan mediasi.⁸²

Konflik terjadi apabila ada benturan kepentingan atau perlakuan tidak adil terhadap kelompok kecil atau masyarakat miskin. Konflik itu akan muncul apabila beberapa aktivitas yang saling bertentangan. Pertentangan itu apabila tindakan itu bersifat mencegah, menghalangi, mencampuri, menyakiti atau

⁸¹Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm. 30-31.

⁸² Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan* (Yogyakarta: Lkis, 2002), hlm. 54., lihat juga Sabian Utsman, *Anatomi Konflik...*, hlm. 17.

membuat tindakan yaitu aktivitas orang lain menjadi tidak berarti.⁸³

Konflik juga dapat terjadi oleh sebab: *Pertama*, tekanan yang semakin keras terhadap peran negara sebagai kekuatan yang berdaulat atas wilayah dan warganya. *Kedua*, posisi negara yang semakin terancam oleh mobilisasi kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap situasi dan kondisi tertentu. *Ketiga*, ambisi-ambisi pribadi para pemimpin faksi dalam negara untuk mengeksploitasi suasana pluralitas untuk kepentingan pribadinya.⁸⁴

Secara umum konflik itu selalu dinilai negatif, sehingga orang selalu berusaha untuk menghindari. Namun demikian, konflik itu juga mempunyai fungsi positif, yaitu sebagai pendorong perubahan sosial, membentuk, mempersatukan dan memelihara struktur sosial, mempererat ikatan kelompok yang terbangun secara longgar, menciptakan kohesi (kepaduan) melalui aliansi dengan kelompok lain, mengaktifkan peran individu yang semula pasif dan apatis dan membantu fungsi komunikasi. Sedangkan fungsi negatifnya adalah menimbulkan keraguan dan keseimbangan pada nilai-nilai sosial yang ada.⁸⁵

Konflik sosial yang terjadi pada dasarnya mempunyai tujuan yaitu: *Pertama*, untuk memperoleh sumber-sumber daya tertentu karena manusia secara alamiah memerlukan sumber daya material-jasmaniah

⁸³ Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas*, , hlm.16.

⁸⁴ Leo Agustino, *Perihal Ilmu Politik, Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 206-210.

⁸⁵ Lewis Coser, *The Function*..... , hlm. 38.

maupun spiritual-rohaniah untuk dapat hidup layak. *Kedua*, untuk mempertahankan sumber-sumber yang dimiliki selama ini dari ancaman dan penguasaan pihak lain. Konflik sosial dan politik dalam kenyataannya memiliki struktur konflik. Struktur konflik terdiri dari: *Pertama*, konflik menang-kalah yaitu suatu situasi konflik yang bersifat antagonistik yang tidak memungkinkan tercapai suatu kompromi diantara pihak-pihak berkonflik yang cirinya adalah tidak mungkin mengadakan kerjasama, hasil kompetisi hanya dinikmati pemenang saja dan yang dipertaruhkan adalah hal-hal prinsip seperti harga diri dan agama. *Kedua*, konflik menang-menang yaitu suatu situasi konflik yang masih mungkin pihak-pihak berkompromi, bekerjasama. Konflik ini tidak menyangkut masalah prinsip.⁸⁶

Oleh karena itu agar konflik lebih efektif atau tidak menimbulkan akibat yang lebih luas, maka perlu diatur atau dikelola secara baik. Pengaturan atau pengelolaan konflik menurut Ralf Dahrendorf yang efektif sangat tergantung pada faktor berikut ini: *Pertama*, kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi. *Kedua*, kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasi dengan baik, sehingga masing-masing memahami lingkup masalahnya. *Ketiga*, kedua pihak sepakat aturan main yang menjadi landasan dan pegangan dalam interaksi mereka. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa bentuk pengaturan konflik adalah: *Pertama*, bentuk konsiliasi yaitu melalui diskusi atau berdebat

⁸⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*....., hlm. 160.

terbuka dan mendalam untuk mencapai kesepakatan. *Kedua*, bentuk mediasi yaitu kedua pihak sepakat mencari penasehat pihak ketiga yang ahli tentang yang diperselisihkan. *Ketiga*, *arbitrase* artinya kedua pihak sepakat untuk memperoleh keputusan akhir yang legal sebagai jalan keluar dari konflik dari arbitrator.⁸⁷

Ada enam cara menurut simpulan Eric Nordlinger untuk pengaturan konflik yaitu: *Pertama*, koalisi pemerintah yang stabil diantara partai-partai politik dengan melibatkan organisasi utama yang berkonflik. *Kedua*, menerapkan prinsip proporsionalitas yaitu posisi-posisi pemerintah yang penting didistribusikan kepada golongan masyarakat secara proporsional. *Ketiga*, penerapan sistem saling-veto yakni suatu keputusan tidak dapat diambil tanpa disetujui semua pihak. *Keempat*, pemimpin kelompok yang berkonflik sepakat untuk tidak melibatkan pemerintah dalam bidang-bidang kebijakan umum yang mempengaruhi nilai-nilai dan kepentingan kelompok yang berkonflik. *Kelima*, pihak yang berkonflik bersedia saling menyesuaikan diri dengan kepentingan dan nilai pihak lain. *Keenam*, cara konsesi yaitu hanya satu pihak yang memberikan konsesi kepada pihak lain, misalnya kelompok yang kuat memberikan sesuatu kepada kelompok lemah.⁸⁸

Konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat diredakan melalui antara lain yaitu: *Pertama*, perasaan kebudayaan satu, termasuk makin pentingnya nasionalisme yang menitikberatkan pada

⁸⁷Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*....., hlm. 161-162.

⁸⁸Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*....., hlm. 162-163.

kesamaan menjadi satu *nation*. *Kedua*, kenyataan bahwa pola-pola keagamaan tidak terwujud secara langsung dalam bentuk-bentuk sosial secara murni dan sederhana, melainkan dalam cara-cara yang berliku-liku hingga janji keagamaan dan janji-janji lainnya kepada kelas, tetangga dan sebagainya cenderung untuk seimbang dan berbagi individu dan kelompok tipe campuran timbul yang bisa memainkan perantara. *Ketiga*, toleransi umum yang didasarkan atas suatu relativisme kontekstual yang menganggap nilai-nilai tertentu memang sesuai dengan konteksnya dan dengan demikian memperkecil *misionisasi*. *Keempat*, pertumbuhan mekanisme sosial yang tetap untuk bentuk-bentuk integrasi sosial yang pluralistik dan non sinkritis dimana orang yang berasal dari berbagai pandangan sosial dan nilai dasar yang berbeda dapat bergaul dengan cukup baik atau satu sama lain dapat menjaga agar masyarakat tetap berfungsi.⁸⁹ Konflik sosial selain berdampak negatif bagi masyarakat, akan tetapi konflik juga dapat berfungsi positif. Menurut Berghe konflik dapat berfungsi: *Pertama*, sebagai alat untuk memelihara soliditas. *Kedua*, membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain. *Ketiga*, mengaktifkan peran individu yang pada awalnya terisolasi. *Keempat*, fungsi komunikasi yaitu sebelum terjadi konflik, kelompok tertentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan, tetapi kemudian dengan adanya konflik posisi dan batas antara kelompok menjadi lebih jelas. Individu maupun kelompok

⁸⁹ Clifford Geertz, *Santri, Abangan dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981), hlm. 175-176.

mengetahui dengan jelas posisi masing-masing dan dengan begitu dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk bertindak dengan lebih tepat.⁹⁰

1.6.3 Teori fungsional

Menurut Poloma teori fungsionalisme selalu digunakan untuk melihat bentuk hubungan sosial di dalam masyarakat. Prinsip untuk mewujudkan keteraturan dan integrasi dalam kehidupan manusia dapat ditemukan dalam teori tersebut. Teori fungsional melihat realitas sosial sebagai suatu sistem yang terintegrasi dengan sub sistem lainnya. Apabila satu sub sistem tidak berfungsi, maka dapat merusak sistem sosial. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai kebutuhan yang merupakan refleksi dari fungsi-fungsi dalam masyarakat yang harus dipenuhi.⁹¹

Menurut teori fungsionalisme masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang selalu berada dalam kondisi keseimbangan atau selalu mengabaikan konflik, sehingga apabila terjadi perubahan pada satu bagian, maka akan mempengaruhi bagian yang lain untuk ikut berubah. Herbert Spencer dan Auguste Comte lebih dahulu menyebut masyarakat sebagai organisme sosial.⁹²

Ciri masyarakat yang terorganisasi dengan baik adalah adanya stabilitas, interaksi personal yang intim, relasi sosial yang berkesinambungan dan ada konsensus di antara anggota masyarakat. Sedangkan masyarakat yang mengalami disorganisasi ditandai oleh perubahan-

⁹⁰ George, Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2002), hlm. 34.

⁹¹ Margareth, Poloma, *Sosiologi Kontemporer.....*, hlm. 56

⁹² John Scott, *Teori Sosial: Masalah-Masalah Pokok dalam Sosiologi*, terj., Ahmad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 41.

perubahan yang serba cepat, tidak stabil, tidak ada kesinambungan pengalaman dari satu kelompok kepada kelompok lainnya, tidak ada intimitas organik dalam relasi sosial dan tidak ada persesuaian di antara anggota masyarakat.⁹³

Ada banyak asumsi penting yang berkembang yaitu: *Pertama*, suatu masyarakat (sebagaimana organisme biologi) mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan itu semakin lama semakin besar dan semakin kompleks. *Kedua*, masing-masing bagian dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang berbeda-beda. *Ketiga*, perubahan yang terjadi pada suatu bagian masyarakat (sebagaimana dalam organisme biologi) mengakibatkan perubahan pada bagian-bagian lain yang akhirnya berpengaruh terhadap sistem secara keseluruhan. *Keempat*, masing-masing bagian tersebut (walaupun saling berkaitan) merupakan sebuah struktur tersendiri yang dapat dipelajari secara terpisah.⁹⁴

Pandangan Merton tentang masyarakat tidak berbeda dengan pandangan Durkheim dan Parson yang menekankan pada aspek struktural. Struktur masyarakat dianggap sebagai sumber dari berbagai tekanan atau ketegangan dan sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut, maka terjadilah berbagai bentuk patologis termasuk fenomena konflik antar suku.⁹⁵ Struktur kultural menurut Merton terdiri dari keseluruhan sistem nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat, sedangkan struktur sosial merupakan keseluruhan hubungan-hubungan interpersonal yang berlaku. Kedua struktur ini mengalami perbedaan yang

⁹³ M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*....., hlm. 56.

⁹⁴ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*....., hlm. 121-123.

⁹⁵ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*....., hlm. 121-123.

menggambarkan adanya hubungan yang tidak serasi antara keduanya.⁹⁶

Teori aksi. Istilah *action* menyatakan secara tidak langsung suatu aktivitas, kreativitas dan proses penghayatan diri individu.⁹⁷ Menurut Talcott Parsons aksi bukanlah perilaku (*behavior*), akan tetapi merupakan tanggapan atau respon mekanis terhadap suatu stimulus. Sedangkan perilaku adalah suatu proses mental yang aktif, kreatif dan yang utama bukanlah tindakan individu, melainkan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang mengatur perilaku.⁹⁸

Bahwa tindakan individu dan kelompok dipengaruhi oleh tiga system yaitu: sistem sosial, sistem budaya, dan sistem kepribadian masing-masing individu. Dalam setiap sistem sosial, individu menduduki suatu status dan berperan sesuai dengan norma atau aturan yang dibuat oleh sistem tersebut dan perilaku ditentukan pula oleh tipe kepribadiannya.⁹⁹

Beberapa asumsi fundamental teori aksi dikemukakan oleh Hinkle sebagai berikut:

- a. Tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subjek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek.
- b. Sebagai subjek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi, tindakan manusia bukan tanpa tujuan.

⁹⁶ Robert K. Merton, "Social Structure and Anomie", dalam Charles Lemert (ed.), *Social Theory the Multicultural and Classic Readings*, (Oxford: Westview Press, 1993), hlm. 250.

⁹⁷ George, Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma.....* hlm. 56.

⁹⁸ Sarwono, Solita, *Sosiologi Kesehatan*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 19 .

⁹⁹ Sarwono, Solita, *Sosiologi Kesehatan.....*, hlm. 19

- c. Dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode, serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut.
- d. Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tidak dapat diubah dengan sendirinya.
- e. Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan, sedang dan yang telah dilakukannya.
- f. Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan.
- g. Studi mengenai antar hubungan sosial memerlukan pemakaian teknik penemuan yang bersifat subjektif, seperti metode *verstehen*, imajinasi, *sympathetic reconstruction* atau seakan-akan mengalami sendiri (*vicarious experienc*).¹⁰⁰

Menurut Parson, tindakan sosial manusia mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Adanya individu selaku aktor.
- b. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu.
- c. Aktor mempunyai alternatif cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuan.
- d. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi, sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu seperti kelamin dan tradisi.
- e. Aktor berada dibawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan dan tindakan

¹⁰⁰ George, Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma...*, hlm. 53-54.

alternatif untuk mencapai tujuan seperti kendala kebudayaan.¹⁰¹

Buku Samuel P. Huntington yang berjudul *The Clash Civilization* telah menimbulkan kontroversial, mengapa? karena dicap sebagai ancaman propagandis, spekulatif dan provokatif bagi sebagian pengamat Islam yang sangat potensial mengancam perdamaian dunia. Salah satu pendasaran jawaban atas pertanyaan tersebut bisa ditemukan pada asumsi yang dibangun Huntington dalam bukunya setebal 600-an halaman yakni bahwa masa depan politik dunia akan didominasi oleh konflik antar bangsa dengan peradaban yang berbeda. Lebih lanjut katanya sumber konflik dunia yang akan datang tidak lagi berupa ideologi atau ekonomi, akan tetapi budaya. Konflik tersebut akan menjadi gejala terkuat yang menggantikan polarisasi ideologi dunia kedalam komunisme dan kapitalisme, bersamaan dengan struktur politik mayoritas negara-negara Eropa Timur.

Huntington mendasarkan pemikirannya pada enam alasan sebagai premis dasar untuk menjelaskan mengapa politik dunia akan sangat dipengaruhi oleh benturan antar peradaban yaitu:

- a. Perbedaan diantara peradaban tersebut tidak saja nyata, tetapi sangat mendasar. Masyarakat dengan pandangan hidup yang berbeda pasti memiliki perbedaan pandangan tentang relasi antara Tuhan dan manusia, individu dan kelompok, kota dan bangsa.
- b. Dunia semakin mengecil, interaksi antara masyarakat dan peradaban yang berbeda terus meningkat. Semakin

¹⁰¹ George, Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan.....*, hlm. 56-57

interaksi ini berlangsung intensif semakin kuat kesadaran akan perbedaan.

- c. Proses modernisasi ekonomi dan perubahan sosial di seluruh dunia mengakibatkan tercabutnya masyarakat dari akar-akar identitas lokal. Ketercabutan ini menyisakan ruang kosong yang diisi oleh identitas agama yang sering berlabel.
- d. Semakin berkembangnya kesadaran peradaban akibat peran ganda dunia Barat. Disatu sisi Barat berada pada puncak kekuasaannya dan pada sisi lain sebagai reaksi balik atas hegemoni Barat kembali masyarakat non Barat pada akar-akar peradabannya.
- e. Karakteristik dan perbedaan kultural yang terjadi antara peradaban Barat dan non Barat semakin mengeras, hal ini menyebabkan semakin sulitnya kompromi dan upaya perbaikan hubungan diantara peradaban dalam rangka kultural dibandingkan dengan upaya mengkompromikan karakteristik dan perbedaan politik dan ekonomi.
- f. *Regionalisme* ekonomi yang semakin meningkat.¹⁰²

Berdasarkan premis-premis itu telah menciptakan jurang perbedaan diantara peradaban-peradaban. Untuk itu, Huntington melakukan dua hal yaitu: *Pertama*, memetakan muatan kultural, kecenderungan dan dinamika internal peradaban-peradaban. Ia menyebutkan delapan peradaban besar dunia yaitu: Barat, Konfusius, Jepang, Islam, Hindu, Slavik, Ortodok, Amerika Latin dan Afrika. Perbedaan-perbedaan itu menyebabkan terjadi benturan. Namun pertanyaannya kemudian peradaban yang manakah yang akan saling berbenturan? Untuk menjawab pertanyaan ini Ia

¹⁰² Samuel P. Huntington, *Benturan Antar peradaban dan Masa depan Politik Dunia*, terj., M. Sadat Ismail (Yogyakarta: Qalam, 2003), hlm. ix-xi.

melakukan langkah langkah. *Kedua*, meramalkan bahwa potensi konflik yang akan mendominasi dunia masa datang bukan diantara kedelapan peradaban tersebut, tetapi antar Barat dan peradaban lainnya. Sedangkan potensi konflik paling besar yang akan terjadi adalah antara Barat dan koalisi Islam-Konfusius

1.6.4 Sistem Politik

Sistem adalah suatu keseluruhan yang kompleks atau terorganisasi, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks.¹⁰³ Sistem adalah kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian yang kait-mengait satu sama lain. Bagian dari satu sistem menjadi induk dari rangkaian selanjutnya. Pemerintah Indonesia adalah suatu contoh sistem pemerintahan dan anak cabangnya adalah sistem pemerintah daerah, seterusnya sistem pemerintah desa.¹⁰⁴ Sistem politik menurut Robert Dahl adalah sebagai pola yang tetap dari hubungan antar manusia yang melibatkan makna yang luas dari kekuasaan, aturan-aturan dan kewenangan.¹⁰⁵ Sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang berupa hubungan antara supra struktur politik dan infra struktur politik.¹⁰⁶ Menurut Gabriel Almond sistem politik adalah merupakan sistem

¹⁰³Pamuji, *Teori Sistem dan Penerapannya Dalam Manajemen*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van- Hoeve, 1981), hlm.4-7.

¹⁰⁴Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Erisco, 1992), hlm. 101.

¹⁰⁵Robert A.Dahl, *Modern Political Analysis*, terj. Mustafa Kamil Ridwan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 64.

¹⁰⁶Sumantri dalam I. Made Pasek Diantha, *Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan dan Demokrasi Modern* (Bandung: Abardin, 1990), hlm. 3.

interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka, yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi.¹⁰⁷

Sistem politik mempunyai ciri-ciri yaitu bahwa betapapun modern atau primitif sifatnya, memiliki beberapa ciri. Menurut Gabriel A Almond terdapat empat ciri sistem politik yaitu:

- a. Semua sistem politik pasti mempunyai struktur politik. Dengan suatu pengertian bahwa di dalam masyarakat yang paling sederhana pun sistem politik dari masyarakat tersebut mempunyai tipe struktur politik yang terdapat di dalam masyarakat yang paling kompleks. Tiap-tiap tipe struktur politik dapat diperbandingkan satu dengan yang lainnya menurut tingkat dan bentuk strukturnya.
- b. Semua sistem politik baik yang sudah modern maupun yang masih primitif menjalankan fungsi yang sama, walaupun frekuensinya berbeda-beda yang disebabkan oleh perbedaan struktur. Demikian pula dapat diperbandingkan bagaimana fungsi-fungsi dari sistem-sistem politik itu dijalankan dan bagaimana pula cara melaksanakannya.
- c. Semua struktur politik baik yang terdapat di dalam masyarakat yang sudah modern maupun masyarakat yang primitif betapapun terspesialisasikan tetap mempunyai sifat multi fungsi.
- d. Semua sistem politik adalah merupakan sistem “campuran” apabila dipandang dari pengertian kebudayaan. Dalam pengertian yang rasional tidak ada struktur dan kebudayaan yang semuanya modern dan

¹⁰⁷Gabriel A. Almond and James S.Coleman, (Eds), *The Politics of the Develoving Areas*, (Princeton University Press. N. J, 1960), hlm. 7.

dalam pengertian yang tradisional tidak semuanya primitif. Perbedaan yang terdapat hanya bersifat relatif saja dan keduanya (hal-hal yang bersifat modern dan tradisional) bercampur satu dengan yang lainnya.¹⁰⁸

Untuk mengenal lebih dalam ciri-ciri sistem politik sebagaimana pendapat Almond, maka perlu juga dikemukakan pendapat David Easton. David Easton menyatakan bahwa ciri-ciri yang utama dari sistem politik adalah sebagai berikut:

- a. Ciri-ciri identifikasi. Untuk membedakan suatu sistem politik satu dengan sistem politik lainnya harus dapat mengidentifikasi sistem politik dengan mendeskripsikan unit-unitnya yang fundamental dan menetapkan batas-batas yang memisahkannya dari unit yang ada diluar sistem politik yaitu:
 - 1) *Unit-unit suatu sistem politik.* Unit-unit ini merupakan elemen-elemen yang dinyatakan membentuk suatu sistem. Elemen tersebut berwujud tindakan-tindakan atau aktivitas-aktivitas politik. Kemanfaatannya untuk memperhatikan tindakantindakan atau aktivitas-aktivitas tersebut selama membentuk peranan-peranan politik dan kelompok-kelompok politik.
 - 2) *Batas-batas.* Beberapa pertanyaan yang paling penting berkaitan dengan operasinya sistem politik hanya dapat dijawab jika kita menyadari bahwa suatu sistem tidak ada yang eksis di dalam suatu lingkungan yang vakum/kosong. Sistem selalu berada di dalam lingkungan. Cara bekerja suatu

¹⁰⁸ Gabriel A. Almond and James S. Coleman, (Eds), *The Politics Areas...*, hlm. 13.

sistem merupakan bagian dari fungsi sistem tersebut untuk menanggapi lingkungan-lingkungan sosial, biologi dan fisik.

- b. Input dan output. Jika sistem dipilih sebagai sasaran studi, hal itu dilakukan karena dengan keyakinan bahwa sistem politik mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang penting bagi masyarakat yakni keputusan-keputusan yang sifatnya otoritatif. Konsekuensi inilah yang disebut dengan *output*.
- c. *Diferensiasi* dalam suatu system. Sebagaimana diketahui bahwa dari lingkungan akan memberikan energi atau tenaga untuk mengaktifkan suatu sistem, dan informasi yang akan dijadikan bahan pertimbangan untuk penggunaan energi atau tenaga tersebut. Dengan cara yang seperti ini suatu sistem dapat bekerja. Pada gilirannya sistem politik akan menghasilkan suatu output yang berbeda dengan input yang masuk atau diperoleh dari lingkungannya yang dapat digunakan sebagai suatu hipotesis bahwa jika suatu sistem politik harus melaksanakan pekerjaan yang bermacam-macam dalam waktu yang terbatas, maka diferensiasi minimal harus ada pada struktur-strukturnya. Pada kenyataannya secara empiris tidak mungkin untuk menemukan suatu sistem politik yang unit-unitnya mengerjakan aktivitas yang sama dalam waktu yang bersamaan. Anggota-anggota dari suatu sistem mengenal pembagian kerja minimal.
- d. *Integrasi suatu sitem*. Diferensiasi struktural mengatur kekuatan-kekuatan yang secara potensi dapat merusak integritas sistem politik. Jika terdapat dua atau lebih unit sedang melakukan aktivitas-aktivitas yang berbeda

dalam waktu yang bersamaan, maka bagaimanakah aktivitas-aktivitas tersebut dapat menghasilkan artikulasi yang berarti apabila anggota-anggota dari sistem tidak mengakhiri kekacauan dalam menghasilkan output yang menyangkut kepentingan bersama. Dengan demikian dapat dirumuskan suatu hipotesis bahwa jika suatu sistem yang memiliki struktur ingin mempertahankan dirinya, maka sistem tersebut harus menetapkan mekanisme yang dapat mengintegrasikan anggotanya untuk bekerjasama yang dapat menghasilkan keputusan otoritatif.¹⁰⁹

Menurut Welsh seperti dikutip Andre Bayo Ala bahwa sistem politik itu memiliki ciri:

- a. Ada interaksi yang teratur antara unit-unit atau anggota baik interaksi langsung maupun tidak langsung yang kuat secara timbal balik.
- b. Ada *interdependensi* (saling ketergantungan satu dengan lainnya) dari interaksi yang dilakukan anggota. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan satu anggota dapat mempengaruhi anggota lain atau memberi perubahan yang terjadi pada satu unit tertentu akan mempengaruhi unit lain.
- c. Adanya *self-maintenance* (pemeliharaan diri) suatu sistem akan membentuk institusi atau kebiasaan untuk mempertahankan eksistensi dan identitasnya.¹¹⁰

¹⁰⁹Grabill A. Almond and James S. Coleman (Eds), *The Politics of.....*, hlm. 6, lihat juga Mohtar Mas'ood dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1984), hlm. 6-7, lihat juga, Budi Warno, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, (Yogyakarta: Med Press, 2008), hlm. 8.

¹¹⁰Andre Bayo Ala, *Hakikat Politik, Siapa melakukan apa untuk memperoleh apa*, (Yogyakarta: Akademika, 1985), hlm. 24. lihat juga, Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan*, hlm. 112.

Untuk menganalisis sistem politik Indonesia dalam kaitan dengan permasalahan disertasi ini perlu dijelaskan juga bentuk sistem politik. Bentuk sistem politik sebagaimana pendapat Gabriel Almond dan James Coleman adalah demokrasi politik, demokrasi terpimpin, oligarki pembangunan dan totaliter. Sedangkan menurut C.F.Strong bentuk sistem politik adalah monarkhi, aristokrasi dan demokrasi.¹¹¹ Dalam disertasi ini hanya akan dibatasi pada bentuk sistem politik yang telah berlaku umum dibanyak negara di dunia yaitu aristokrasi, demokrasi dan monarkhi.

a. Sistem Demokrasi

Secara etimologis “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratos/cratein*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan atau rakyat yang berkuasa (*government or rule by the people*).¹¹² Gabungan dua kata *demos-cratos* mempunyai arti suatu keadaan negara yang sistem pemerintahannya dengan kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹¹³ Secara terminologi demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang

¹¹¹Sumarno, A. P, *Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1980), hlm. 61

¹¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu.....*, hlm. 50.

¹¹³A.Ubaedillah, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE Syarif Hidayatullah, 2006), hlm.131.

sama bagi semua warga negara.¹¹⁴ Menurut Joseph A.Schmeter demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik yang setiap individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Demokrasi menurut Sidney Hook adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.¹¹⁵

Demokrasi dalam pandangan A.W.Wijaya adalah sistem pemerintahan yang mengakui hak segenap anggota masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada demokrasi langsung keputusan politik ditentukan oleh masyarakat dalam suatu pertemuan bersama. Demokrasi adalah pemerintahan dengan pengawasan rakyat atau pengawasan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Demikian juga bahwa demokrasi adalah pemerintah rakyat, dalam bentuk pemerintahan negara, yaitu rakyat ikut serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya.¹¹⁶

Dengan demikian demokrasi adalah suatu sistem bernegara yang mengutamakan peran rakyat dalam proses politik. Sebagai suatu sistem pemerintahan yang berada ditangan rakyat mengandung pengertian bahwa

¹¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 1990), hlm. 195.

¹¹⁵ A.Ubaedillah, *Demokrasi, HAM*....., hlm. 131.

¹¹⁶ Eddy Kurniadi, *Peranan Pemuda dalam Pembangunan Politik di Indonesia*, (Bandung: Angkasa,1991), hlm. 10.

pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan dari mayoritas rakyat melalui mekanisme pemilu. Pemerintahan oleh rakyat mengandung arti bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat. Pemerintahan untuk rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan yang diberikan rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.¹¹⁷ Paham demokrasi seperti yang terdapat di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada hakikatnya adalah suatu paham liberal yang berakar dari para pemikir liberal seperti Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu dan Voltaire. Paham ini mengagung-agungkan orang seorang dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sesungguhnya dan yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan dan kebebasan seluas-luasnya dibidang ekonomi yang melahirkan kapitalisme penjajahan hampir meliputi seluruh dunia.¹¹⁸

Menurut Samuel P. Huntington demokrasi didefinisikan dengan adanya pemilu yang terbuka, bebas dan adil, adanya pembagian kekuasaan yang jelas, terjaganya stabilitas dan adanya tingkat partisipasi yang luas dan otonom.¹¹⁹ Dalam demokrasi terdapat unsur yang menurut Masykuri Abdillah adanya kemauan politik dari negara (*state*), adanya komitmen yang kuat dari masyarakat politik (*political society*) dan adanya *civil society* yang kuat dan

¹¹⁷A. Ubaedillah, *Demokrasi, HAM*....., hlm. 132.

¹¹⁸ A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara, Pemikiran Politik Ibn Khaldun*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 154.

¹¹⁹Leo Agustino, *Perihal Ilmu Politik*, hlm. 141.

mandiri.¹²⁰ Ketiga unsur tersebut diwujudkan dalam sebuah negara untuk menjamin adanya kekuasaan mayoritas, suara rakyat dan pemilihan umum yang bebas dan bertanggungjawab.¹²¹ Dalam demokrasi juga terdapat dua norma baku yang berlaku bagi setiap bentuk demokrasi, yaitu *public accountability* (pertanggungjawaban kepada rakyat) dan *contestability* (uji kesahihan apakah demokrasi itu bercermin kepada kehendak bersama atau atas nama kepentingan lain).¹²²

Demokrasi berarti kedaulatan ditangan rakyat artinya kepala negara dan Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh rakyat dan kebijakan pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Bentuk demokrasi yang lazim diterapkan di berbagai negara adalah demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang dalam praktiknya rakyat memilih kepala negara secara langsung. Ada pula demokrasi perwakilan, yaitu demokrasi yang dalam praktiknya rakyat memilih anggota dewan sebagai perwakilan dari rakyat, kemudian dewan perwakilan itulah yang memilih presiden.¹²³

Sedangkan Joeniarto membagi demokrasi ke dalam tiga bentuk yakni:

- 1) Demokrasi perlementer, yaitu demokrasi dimana hubungan antara badan perwakilan dengan

¹²⁰Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2006), hlm. 180.

¹²¹Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 73.

¹²²Soetjipto Wirosardjono, "Demokrasi " dalam Frans Magnis Suseno dkk, *Agama dan Demokrasi*, (Jakarta: P3M-FNS, 1994), hlm. 14-15.

¹²³Inu Kencana Syafi'i, *Pengantar Ilmu Pemerintahan.....*, hlm. 69-71.

eksekutif yang menjalankan kekuasaan adalah saling mempengaruhi dan eksekutif harus bertanggungjawab kepada legislatif.

- 2) Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, yaitu badan eksekutif tidak bertanggungjawab kepada badan perwakilan. Antara kekuasaan keduanya terpisah secara penuh. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden yang dipilih oleh rakyat. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan dalam arti yang sebenarnya yang dibantu oleh para menteri. Badan legislatif tidak dapat menjatuhkan presiden maupun menteri karena ketidakpercayaannya. Perselisihan antara keduanya diselesaikan oleh badan Yudikatif.
- 3) Demokrasi dengan sistem referendum, yaitu eksekutif merupakan badan yang hanya melaksanakan pekerjaan badan perwakilan, melaksanakan apa yang dikehendaki oleh legislatif. Apabila terjadi perselisihan, maka eksekutif harus tunduk kepada legislatif.¹²⁴ Tiga dari lima bentuk demokrasi yang dikemukakan di atas pernah dan sedang diterapkan di Indonesia baik pada masa Orde Lama, Orde Baru maupun Reformasi.

Prinsip-prinsip demokrasi menurut M. Amin Rais sebagaimana dikutip M. Mahfoed MD dan disarikan juga dari pandangan Inu Kencana Syafi'i sebagai berikut:

¹²⁴ Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 69-71.

- 1) Rakyat harus berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Jika rakyat tidak berpartisipasi, maka pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan keinginan rakyat.
- 2) Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.
- 3) Pendapatan negara harus didistribusikan secara adil bagi seluruh warga negara.
- 4) Semua rakyat harus diberi kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.
- 5) Harus ada kebebasan untuk mengemukakan pendapat termasuk kebebasan pers dan kebebasan untuk berkumpul dan beragama.
- 6) Rakyat berhak mendapat informasi seluas-luasnya.
- 7) Mengindahkan fatsoen atau tatakrama politik.
- 8) Ada semangat kerjasama.
- 9) Ada pembagian kekuasaan, pemilu yang bebas, manajemen yang terbuka, pengakuan hak-hak minoritas, pemerintahan yang didasarkan hukum, peradilan yang bebas, adanya beberapa partai politik, ada konsensus, ada persetujuan oleh legislatif terhadap kebijakan eksekutif dan ada pemerintah yang konstitusional.
- 10) Ada ketentuan demokrasi yang tercantum dalam undang-undang dasar.
- 11) Pengawasan terhadap administrasi negara, perlindungan hak asasi manusia, pemerintahan mayoritas (tidak ditangan satu orang), persaingan keahlian, ada mekanisme politik, kebebasan dalam

penetapan kebijakan negara (tanpa intervensi pihak lain).¹²⁵

Demokrasi dalam perspektif UUD 1945 adalah demokrasi Indonesia yang menegakkan kembali asas-asas negara hukum, sehingga warga negara merasakan kepastian hukum, hak-hak asasi manusia baik dalam aspek kolektif maupun dalam aspek perseorangan yang terjamin dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara konstitusional. Dalam kaitan ini diusahakan agar lembaga-lembaga dan tatakerja Orde Baru dilepaskan dari ikatan pribadi dan lebih dilembagakan. Sedangkan demokrasi ekonomi sesuai dengan asas-asas yang menjiwai ketentuan-ketentuan mengenai ekonomi dalam UUD 1945 yang hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara yang mencakup antara lain adanya pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan negara, koperasi, pengakuan atas hak milik perseorangan dan kepastian hukum dalam penggunaannya serta peranan pemerintah yang bersifat pembinaan, penunjuk jalan serta pelindung.

Sedangkan menurut hasil Munas Persahi pada tahun 1966 bahwa asas negara hukum Pancasila mengandung prinsip yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan.

¹²⁵ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 183-185, Lihat juga Ismail Sunny, *Pembagian Kekuasaan Negara, Suatu Penyelidikan Perbandingan Dalam Hukum Tata Negara Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet dan Indonesia*, (Jakarta: Dep. Penerangan RI, 1962), hlm. 7-8., lihat juga Inu Kencana Syafi'i, *Pengantar Ilmu.....* , hlm. 87-89.

- b. Peradilan yang bebas, tidak memihak dan tidak terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan apapun.
- c. Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya. Menurut hasil Simposium Hak Asasi Manusia tahun 1967, bahwa predikat yang akan diberikan kepada demokrasi Indonesia haruslah demokrasi yang bertanggung jawab artinya demokrasi yang dijiwai oleh rasa tanggungjawab terhadap Tuhan dan sesama manusia.¹²⁶

Demokrasi adalah berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah suatu negara. Oleh karena itu Komisi Internasional Ahli Hukum pada Konferensi di Bangkok tahun 1965 merumuskan syarat-syarat dasar penyelenggaraan pemerintah yang demokratis dibawah *Rule of Law* yaitu: perlindungan konstitusional yang menjamin hak-hak individu dan menentukan prosedur untuk memperoleh perlindungan hak-hak yang dijamin, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan berserikat dan beroposisi dan pendidikan kewarga negaraan.¹²⁷

Untuk membumikan demokrasi Thomas Meyer menawarkan syarat yaitu:

- a. Penegakan Hak Asasi Manusia dalam segala segi kehidupan manusia.

¹²⁶Kaelan, M.S (Editor). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Paradigma, 2002), hlm. 29.

¹²⁷ Kaelan, M.S, *Pendidikan Kewarganegaraan.....*, hlm. 27.

- b. Adanya pemisahan antara kekuasaan (politik) dengan negara hukum.
- c. Terlembaganya gagasan akan pluralisme.
- d. Parlemen dan pemerintah, yaitu terinstitusinya oposisi loyal di parlemen.
- e. Otonomi daerah dan komunitas lokal, yakni adanya pengakuan demokrasi lokal.
- f. Partai politik dan pemilu yang adil dan egaliter.
- g. Tumbuhnya asosiasi dalam masyarakat untuk mengakomodasi aspirasi publik.
- h. Tumbuhnya masyarakat sipil dengan sehat.
- i. Ranah publik, yaitu tersedianya ruang publik yang dapat dimanfaatkan warga negara.
- j. Terwujudnya budaya politik yang beradab.¹²⁸

Sebuah sistem politik dapat disebut sebagai sistem demokrasi apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan
- b. Adanya persamaan hak antar warga negara.
- c. Adanya kebebasan dan kemerdekaan setiap warga negara.
- d. Adanya sistem perwakilan yang efektif.
- e. Adanya sistem pemilu yang menjamin dihormatinya prinsip-prinsip bersama.¹²⁹

Prinsip-prinsip demokrasi sebuah pemerintahan dapat disebut sebagai pemerintahan yang demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahan melaksanakan

¹²⁸ Leo Agustino, *Perihal Ilmu Politik*, hlm. 142.

¹²⁹ Lyman T. Sargent, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer Sebuah Analisis Komparatif*, terj., A.R Henry Sitanggang, (Jakarta: Erlangga, 1987), hlm. 29.

prinsip-prinsip demokrasi. Beberapa prinsip demokrasi dalam pandangan Sadek J.Sulaiman yang harus dilaksanakan dalam sistem demokrasi adalah:

- a. Kebebasan berbicara. Setiap warga negara berhak mengemukakan pendapatnya tanpa harus merasa takut. Dalam sistem demokrasi prinsip ini sangat penting untuk mengontrol kekuasaan agar berjalan dengan benar.
- b. Pelaksanaan pemilu. Pemilu merupakan sarana yang konstitusional untuk melihat dan menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau perlu diganti dengan yang lain.
- c. Kekuasaan dipegang oleh mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas. Prinsip ini mengakui adanya hak oposisi suatu kelompok terhadap pemerintah.
- d. Peran penting partai politik. Rakyat berhak dengan bebas mendukung partai mana yang lebih sesuai dengan pandangan dan pilihannya.
- e. Adanya pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan pemisahan ini akan ada *checks and balances* sehingga kekuasaan akan terhindar dari praktik-praktik eksploitatif.
- f. Demokrasi menekankan adanya supremasi hukum. Semua individu harus tunduk di bawah hukum tanpa memandang kedudukan dan status sosialnya.
- g. Semua individu bebas mempunyai hak memilih tanpa boleh diganggu oleh pihak manapun.¹³⁰

¹³⁰ Sadek J. Sulaiman, " *Shura and Democracy*" dalam Charles Khurzan, *Liberal Islam*, (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 97, lihat juga, Lyman Tower Sargent, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer.....*, hlm. 50.

Selain itu diperlukan adanya kebebasan mengakses informasi, kebebasan berserikat, adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum dan adanya partai politik yang berperan kuat. Oleh karena itu, demokrasi sebagai pandangan hidup mempunyai ciri sebagai berikut:

- a. Prinsip pentingnya kesadaran akan kemajemukan. Hal ini bukan saja sekedar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang mejemuk, tetapi menghendaki tanggapan yang positif terhadap kemajemukan itu sendiri. Masyarakat yang memegang teguh pandangan hidup demokrasi harus memelihara dan melindungi lingkup keanekaragaman yang luas.
- b. Keinsafan akan makna dan semangat musyawarah yang mengharuskan adanya keinsafan untuk tulus menerima kemungkinan terjadinya kompromi atau bahkan kalah suara. Semangat musyawarah menuntut agar setiap orang menyadari bahwa tidak semua pikiran dan kepentingannya diterima atau dilaksanakan. Intinya bahwa monolitisme dan absolutisme adalah bertentangan dengan cara hidup demokratis.
- c. Cara haruslah sesuai dengan tujuan. Ungkapan “tujuan menghalalkan segala cara” mengisyaratkan kutukan kepada orang yang berusaha meraih tujuannya dengan cara-cara yang melupakan pertimbangan moral. Oleh karena itu, pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa tujuan haruslah dicapai dengan cara-cara yang baik atau mengedepankan kebaikan dalam metode.
- d. Bahwa suasana masyarakat demokrasi mempersyaratkan nilai kejujuran dalam proses permusyawaratan. Selain itu harus pula tersedia faktor

ketulusan, yakni mengandung makna pembebasan dari *vested interest* yang berlebihan, sehingga akan merusak nilai dan semangat demokrasi itu sendiri.

- e. Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, yakni pangan, sandang dan papan. Karena ketiga kebutuhan pokok ini berkaitan dengan dimensi sosial dan budaya karena itu diperlukan perencanaan sosial-budaya. Bahwa warga masyarakat demokratis dituntut untuk memenuhinya secara berencana dan sekaligus mampu dipastikan sejalan dengan tujuan dan praktik demokrasi.
- f. Adanya kerjasama yang saling percaya antar warga negara untuk saling mendukung secara fungsional. Masyarakat harus dijauhkan dari rasa saling mencurigai secara horizontal yang sering menimbulkan biaya demokrasi yang terlalu tinggi dan tidak efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan landasan pandangan kemanusiaan yang positif dan optimistis.
- g. Adanya pendidikan demokrasi yang sehat. Bahwa nilai-nilai dan pengertian-pengertian demokrasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan sehingga akan tersosialisasikan secara lebih berkualitas kepada masyarakat luas.¹³¹

Untuk kasus negara Indonesia yang merupakan negara transisi menuju negara demokrasi masih saja mempraktikkan sistem negara otoriter, misalnya ketika kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa diganggu, maka laporan ke kepolisian dengan berbagai dalih

¹³¹Nurcholis Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm.105.

merupakan sebuah ancaman yang selalu digunakan untuk membelenggu kebebasan berbicara.

Demokrasi merupakan perwujudan kehendak manusia untuk memperoleh penghargaan dan suasana yang tepat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang dianutnya. Untuk itu sejalan pula dengan yang dikatakan Henry B. Mayo bahwa demokrasi memiliki nilai-nilai yaitu :

- a. Menyelesaikan permasalahan secara damai dan sukarela dan melembaga.
- b. Menjamin terjadinya perubahan secara damai.
- c. Pergantian penguasa secara teratur melalui pemilu yang terbuka dan adil.
- d. Meminimalisir penggunaan paksaan dalam setiap tindakan perubahan.
- e. Pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman.
- f. Menegakkan keadilan sebagai moralitas politik.
- g. Memajukan ilmu pengetahuan.
- h. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.¹³²

Selain telah dikemukakan tentang prinsip demokrasi, selanjutnya akan dibahas juga model-model demokrasi. Model atau corak demokrasi yang diajukan banyak diterapkan di berbagai negara walaupun terjadi perbedaan dalam implementasinya. Model demokrasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Demokrasi Liberal yaitu pemerintah yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang

¹³² Henry B. Mayo, "Nilai-Nilai Demokrasi" dalam Miriam Budiarmo, (ed), *Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: Gramedia, 1975), hlm. 165-191., lihat juga, Leo Agustino, *Perihal Ilmu Politik*, hlm. 142, lihat juga Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar.....*, hlm. 62-63.

diselenggarakan dalam waktu tertentu secara terus-menerus atau disebut Demokrasi Konstitusional yaitu demokrasi yang didasarkan atas kebebasan. Ciri khas pemerintahan demokrasi Konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperbolehkan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya serta kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.

- b. Demokrasi Terpimpin yaitu para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat, tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan.
- c. Demokrasi sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
- d. Demokrasi partisipasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.
- e. Demokrasi *consociational* yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.¹³³

Negara-negara di Afrika banyak menerapkan model demokrasi Liberal, tetapi hanya sedikit yang bisa bertahan. Sedangkan Indonesia pernah menerapkan demokrasi Terpimpin pada kurun waktu 1959-1965. Selain itu ada juga model Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum

¹³³Tim ICCE, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 121.

negara atau undang-undang. Sedangkan demokrasi tidak langsung yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan atau demokrasi perwakilan. Adapun demokrasi yang mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial yaitu manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada kepemilikan pribadi tanpa penindasan dan paksaan, akan tetapi untuk mencapai masyarakat tersebut perlu dengan cara paksaan atau kekerasan. Demokrasi ini disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme-Komunisme atau disebut Demokrasi rakyat. Demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi dan demokrasi materiil yaitu demokrasi yang menitikberatkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang mendapat perhatian, bahkan kadang-kadang dihilangkan.¹³⁴

Model demokrasi yang ditawarkan David Held ada 13 yang dalam implementasinya memiliki ciri sesuai dengan kondisi negara, yaitu: *Pertama*, Demokrasi Klasik. *Kedua*, Demokrasi Republikanisme Protektif. *Ketiga*, Demokrasi Protektif. *Keempat*, Demokrasi Langsung atau Partisipasi. *Kelima*, Demokrasi Developmental. *Keenam*, Demokrasi Kompetisi Elit. *Ketujuh*, Demokrasi Pluralism. *Kedelapan*, Demokrasi Legal. *Kesembilan*, Demokrasi Deliberative. *Kesepuluh*, Otonomi Demokrasi. *Kesebelas*, Demokrasi Liberal atau Perwakilan. *Keduabelas*,

¹³⁴ Suprpto dkk, *Kewarganegaraan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 6-7.

Demokrasi atas dasar satu Partai. *Ketigabelas*, Demokrasi Cosmopolitan.¹³⁵

Selanjutnya dikemukakan juga parameter negara demokrasi. Parameter adalah ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari yang terdapat di dalam percontohan merupakan ukuran atau patokan yang digunakan terhadap pertumbuhan bisnis. Jadi parameter dalam demokrasi adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah negara dapat disebut telah menganut sistem demokrasi atau tidak. Bagaimana mengukur sebuah negara dapat disebut negara demokratis? dan apa indikator negara demokrasi itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat digunakan parameter sistem negara demokratis berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pembentukan pemerintahan. Dapat dipahami bahwa pemilihan umum merupakan instrumen penting guna memungkinkan berlangsungnya proses pembentukan pemerintahan yang baik.
- b. Dasar kekuasaan negara. Hal ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawaban langsung kepada rakyat.
- c. Susunan kekuasaan negara. Kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan. Penyelenggara kekuasaan negara diatur dalam satu sistem aturan yang membatasi dan memberikan koridor

¹³⁵ David Held, *Model of Democracy, Second Edition*, (California: Stanford University Press, 1996), hlm. 13-353, lihat juga David Held, *Democracy and The Global Order: From The Modern State to Cosmopolitan Governance*, terj. Damanhuri, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 5-6.

pelaksanaannya. Aturan itu setidaknya-tidaknya memungkinkan terjadinya desentralisasi untuk menghindari sentralisasi dan memungkinkan pembatasan agar kekuasaan tidak menjadi tidak terbatas.

- d. Kontrol rakyat. Perlunya tercipta relasi antara kekuasaan dengan rakyat secara baik yang memungkinkan terjadi *check and balance* terhadap kekuasaan yang sedang dijalankan oleh eksekutif dan legislatif.

Menurut Djuanda Widjaya bahwa dalam negara demokratis terindikasi oleh adanya suasana kehidupan warga negara yang hak dan kewajiban politik dinikmati dan dilaksanakan warga negara berdasarkan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang menjamin adanya kebebasan, kemerdekaan dan rasa merdeka. Penegakan hukum yang berdasarkan prinsip supremasi hukum, kesamaan didepan hukum dan jaminan terhadap HAM. Kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat, kebebasan pers dan pers yang bertanggungjawab. Pengakuan terhadap hak minoritas, pembuatan kebijakan negara yang berdasarkan pada asas pelayanan, pemberdayaan dan pencerdasan. Adanya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif, terciptanya keseimbangan dan keharmonisan, adanya tentara yang profesional sebagai kekuatan pertahanan dan lembaga peradilan yang mandiri.¹³⁶

Dalam menentukan negara demokrasi, Afan Gafar menggunakan indikator sebagai berikut ini:

- a. Akuntabilitas (pertanggungjawaban). Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat

¹³⁶Tim ICCE, *Demokrasi, HAM dan.....*, hlm. 124.

mempertanggungjawabkan kebijakan yang dibuatnya menyangkut kepentingan rakyat. Selain itu ia juga harus mempertanggungjawabkan sikap dan perilakunya sebagai publik figur beserta orang-orang dekatnya, karena ia harus menjadi teladan masyarakatnya. Oleh karena itu, para pemegang jabatan publik harus senantiasa siap menghadapi kemungkinan terjadinya *public security*.

- b. Rotasi kekuasaan yang teratur dan damai. Rotasi kekuasaan ialah terjadinya pergantian pemerintahan secara teratur dengan cara damai dari satu pemerintahan kepada pemerintahan yang lain, baik dari partai yang sama maupun berbeda, baik tingkat lokal maupun nasional. Partai politik yang memenangkan pemilu ditingkat lokal diberi kesempatan untuk membentuk eksekutif. Oleh karena itu, pemimpin nasional dan lokal boleh jadi tidak berasal dari partai yang sama.
- c. Rekrutmen politik terbuka. Sistem rekrutmen terbuka sangat diperlukan untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan. Artinya bahwa setiap orang yang memenuhi syarat untuk suatu jabatan politik mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk berkompetisi guna mengisi jabatan politik tersebut. Proses pengisian jabatan politik tidak dilakukan oleh sekelompok elit tertentu dan tidak bersifat tertutup, tetapi oleh kapasitas kepemimpinan dan sumber legitimasi yang dimilikinya.
- d. Pemilu yang luber dan jurdil. Pemilu dilaksanakan secara teratur dan terbuka bagi setiap warga negara yang mempunyai hak memilih dan dipilih, rakyat bebas

dalam menggunakan hak pilihnya sesuai dengan perhitungan kepentingannya secara rasional tanpa paksaan, rasa takut dan bebas ambil bagian dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu termasuk juga melakukan kampanye.

- e. Rakyat menikmati hak dasarnya. Hak dasar rakyat menurut konvensi PBB adalah hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk menikmati pers yang bebas. Hak tersebut digunakan untuk menyatakan preferensi politik tentang suatu masalah yang muncul dalam kehidupan bernegara untuk mengemukakan agenda politik apa yang menurutnya merupakan hal yang penting untuk dimunculkan serta untuk mengontrol perilaku pemegang jabatan. Hak untuk berserikat dan berkumpul diwujudkan dengan melibatkan diri dalam berbagai organisasi politik maupun sosial tanpa dihalangi oleh siapapun dan oleh institusi apapun. Sedangkan kebebasan pers dalam masyarakat yang demokratis mempunyai makna bahwa masyarakat dunia pers dapat menyampaikan informasi apa saja yang dipandang perlu sepanjang tidak bersifat menghasut, menghina dan mengadudomba sesama masyarakat. Pers berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang sangat penting.¹³⁷

Ciri sistem demokrasi menurut Robert A. Dahl dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Pengawasan atas kebijakan pemerintah dilakukan secara konstitusional oleh wakil-wakil yang dipilih.

¹³⁷Dikutip dalam Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi Telaah Konsep dan Historis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm, 33-34.

- b. Perwakilan rakyat yang dipilih dalam pemilu yang dilakukan secara jujur, berkala dan tanpa paksaan.
- c. Semua orang dewasa berhak memilih dan dipilih.
- d. Warga negara berhak menyatakan pendapat mengenai berbagai masalah politik tanpa ancaman hukuman berat.
- e. Warga negara berhak memperoleh sumber-sumber informasi alternatif dan dilindungi oleh hukum.
- f. Warga negara berhak membentuk perkumpulan atau organisasi yang independen, termasuk partai politik.¹³⁸

Sebuah sistem dapat disebut demokrasi menurut Juan Linz apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan kebebasan masyarakat untuk merumuskan preferensi politik mereka melalui jalur perserikatan, informasi dan komunikasi.
- b. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bersaing secara teratur melalui cara-cara damai.
- c. Memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk memperebutkan jabatan politik yang ada.¹³⁹

Demokrasi menurut Nurcholis Madjid merupakan warisan kemanusiaan yang mempunyai nilai tinggi sehingga belum ditemukan alternatif yang melebihinya dalam kurun waktu sampai sekarang.¹⁴⁰ Oleh karena itu menurut Robert A. Dahl apabila demokrasi dilaksanakan secara sungguh-sungguh akan memberikan implikasi yang baik antara lain dapat menghindari tirani, hak-hak asasi,

¹³⁸ Robert A. Dahl, *Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy Versus Control*, (New York: Yale University, 1982), hlm. 10-11, lihat juga Robert A. Dahl, *Analisis Politik Modern*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 94-95.

¹³⁹ Bachtiar Effendi, *Teori Baru Politik Islam: Partautan Agama, Negara dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 106.

¹⁴⁰ Dalam Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi*....., hlm, 36.

kebebasan umum, menentukan nasib sendiri, otonomi moral, perkembangan manusia, menjaga kepentingan pribadi yang utama, persamaan politik, mencari perdamaian dan kemakmuran.¹⁴¹ Sebagai sebuah sistem dalam kehidupan bernegara, demokrasi menjadi keganderungan manusia yang mampu bertahan sampai saat ini, karena telah menghasilkan kebijakan yang bijak, suatu kehidupan masyarakat yang adil, suatu masyarakat yang bebas, keputusan yang memajukan kepentingan rakyat sehingga memperoleh manfaat bersama, menghargai hak-hak individu yang memposisikan individu-individu sebagai hakim atau pelindung kepentingannya sendiri, memajukan pengetahuan dan kegiatan intelektual. Bahkan demokrasi telah mampu menyatukan masyarakat. Dalam sistem demokrasi masyarakat tidak merasa dipaksa pemerintah untuk melakukan sesuatu yang dianggap tidak semestinya dilakukan termasuk kaum minoritas sekalipun dilindungi secara hukum.¹⁴²

Menurut Robert Dahl sebagaimana dikutip Syarifuddin Jurdi, bahwa demokrasi merupakan cara terbaik untuk memerintah negara apabila dibandingkan dengan cara-cara yang lain dengan alasan sebagai berikut:

- a. Demokrasi menolong tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik.

¹⁴¹ Dikutip dari Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 632.

¹⁴²Peter Jhones, "Persamaan Politik dan Kekuasaan Mayoritas" dalam David Miller dan Lary Siedentop, *Politik dalam Perspektif Pemikiran Filsafat dan Teori*, (Jakarta: Raja Wali Press, t.th), hlm. 254-283 dan Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1992), hlm. 3-4.

- b. Negara menjamin bagi warga negara akan sejumlah hak asasi yang tidak diberikan dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis.
- c. Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya dari pada pilihan lain.
- d. Demokrasi membantu melindungi kepentingan pokok manusia, karena semua orang memerlukan kelangsungan hidup.
- e. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada warga negara untuk menggunakan kebebasan menentukan nasib sendiri yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri dan untuk menjalankan tanggungjawab moral.
- f. Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih total.
- g. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat membantu perkembangan kadar kesamaan politik yang relatif tinggi.
- h. Negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berperang satu dengan lainnya.
- i. Negara-negara dengan pemerintahan yang demokratis cenderung lebih makmur dari pada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis.¹⁴³

Itulah sebabnya demokrasi menjadi pilihan sistem bernegara yang dianggap paling baik untuk membangun negara yang modern. Hal itu telah dipraktikkan oleh beberapa negara yang implikasinya memang menunjukkan sebuah negara yang lebih maju dalam banyak hal sebagai contoh Amerika, Jerman dan Inggris.

¹⁴³Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik*, hlm. 633-634.

Dalam beberapa analisis terdapat tiga kelompok pemikiran politik Islam yang saling berbeda dalam melihat hubungan Islam dengan demokrasi. Untuk itu akan diuraikan peta pemikiran tersebut secara singkat yaitu:

- a. Kelompok yang menolak demokrasi yang diwakili oleh para ahli antara lain: Syekh Fadhalah Nuri yang berpandangan bahwa salah satu kunci demokrasi adalah persamaan semua warga negara adalah sesuatu yang tidak mungkin dalam Islam. Karena ada manusia yang beriman dan kafir, kaya-miskin, ahli hukum dan pengikutnya. Ia menolak legislasi oleh manusia, karena Islam adalah agama yang tidak mempunyai kekurangan sehingga perlu disempurnakan. Dalam Islam tidak seorangpun diizinkan mengatur hukum. Paham konstitusi yang merupakan bagian dari demokrasi bertentangan dengan Islam.¹⁴⁴ Adalah Thabathaba'i seorang mufassir dan filosof Iran terkenal berpendapat bahwa Islam dan demokrasi tidak bisa dirujukkan karena prinsip mayoritasnya. Setiap agama besar selalu bertentangan, bukan menyesuaikan diri dengan kehendak mayoritas. Manusia sering tidak menyukai yang adil dan benar sebagaimana kutipan ayat:” Bahwa seandainya kebenaran itu mengikuti kehendak mereka sendiri, pasti akan binasalah langit dan bumi beserta isinya (Q.S 23: 70-71)”. Oleh karena itu, tidaklah benar menganggap tuntutan mayoritas selalu adil dan mengikat.¹⁴⁵

¹⁴⁴Dikutip dalam Sukron Kamil, *Islam dan.....* ... , hlm. 48.

¹⁴⁵Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Syiah, Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad 20*, (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 211.

Pemikir Ikhwanul Muslimin Sayid Qutub sangat keras menentang setiap kedaulatan rakyat. Konsep kedaulatan rakyat adalah pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan dan merupakan bentuk tirani manusia kepada manusia lainnya. Mengakui kekuasaan Tuhan berarti melakukan penentangan secara menyeluruh terhadap kekuasaan manusia. Agresi menentang kekuasaan Tuhan di atas bumi merupakan bentuk kebodohan. Oleh karena itu, negara Islam harus berlandaskan prinsip musyawarah dan Syari'ah sebagai sebuah sistem hukum dan moral sudah lengkap sehingga tidak perlu legislasi.¹⁴⁶

- b. Kelompok yang mengakui terdapat perbedaan antara demokrasi dengan Islam. Kelompok ini diwakili oleh Abul 'Ala al-Maududi dari Pakistan. Ia berpendapat bahwa terdapat kesamaan antara Islam dan demokrasi dalam beberapa prinsip seperti keadilan (Q.S, 42: 15), akuntabilitas pemerintahan (Q.S, 4: 58), musyawarah (Q.S, 42: 38), persamaan (Q.S, 49: 13), tujuan negara (Q.S, 22: 4) dan oposisi (Q.S, 33: 70). Akan tetapi, terdapat juga perbedaan bahwa kalau dalam sistem Barat suatu negara demokrasi menikmati hak-hak kedaulatan mutlak, maka dalam demokrasi Islam kekhilafahan ditetapkan dengan batasan hukum Ilahi. Negara yang didirikan atas dasar kedaulatan Tuhan tidak dapat melakukan legislasi yang bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah betapapun merupakan konsensus mayoritas rakyat yang menuntutnya. Kasus lolosnya RUU Amerika Serikat tentang kebolehan minuman keras tidak akan terjadi dalam sistem

¹⁴⁶ Dikutip dalam Sukron Kamil, *Islam dan* , hlm. 48.

pemerintahan Islam. Namun tidak berarti mengabaikan potensi manusia dan tidak ada peluang sama sekali bagi legislasi manusia. Masalah administrasi dan masalah yang tidak ada penjelasan secara jelas dari Syari'ah ditetapkan berdasarkan konsensus diantara kaum muslimin yang memenuhi kualifikasi.

Dengan demikian, sistem Islam mengambil jalan moderat yang oleh Abul 'Ala al-Maududi disebut sistem pemerintahan Teo-Demokrasi yaitu suatu sistem pemerintahan demokrasi Ilahi atau suatu sistem kedaulatan rakyat yang dibatasi kedaulatan Tuhan melalui hukum-hukum-Nya.¹⁴⁷ Oleh karena itu, peluang manusia untuk melakukan legislasi pada aspek-aspek yang belum ditemukan dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah atau dalam Syari'ah Islam masih terbuka. Hal itupula yang menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai akal manusia karena itu banyak ayat al-Qur'an yang mendorong menggunakan akal, seperti *afala tatafakkarun*, *afala ta'qilun* dan sebagainya. Masih termasuk dalam kelompok kedua yaitu seorang pemikir Mesir, Taufiq asy-Syawii. Ia berpendapat bahwa demokrasi merupakan bentuk *syura* versi Eropa. Demokrasi tidak sama dan bukan *syura*, karena tidak berpegang pada Syari'ah Islam. Sedangkan *syura* tunduk pada Syari'ah seperti juga umat Islam dan negara tunduk pada Syari'ah. Bagi Taufiq demokrasi konvensional rentan terhadap kediktatoran. Karena demokrasi tersebut memberi peluang penguasa

¹⁴⁷Abul 'Ala al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, terj., Hukum dan Konstitusi Politik Islam, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 160-161 dan Abul 'Ala al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 94.

melakukan usaha untuk mempengaruhi kekuasaan legislatif dan menciptakan undang-undang yang berfungsi untuk memperluas kekuasaannya. Dengan begitu sebenarnya sistem *syura* lebih maju dari sistem demokrasi modern, sekalipun karena sistem *syura* mewajibkan para penguasa berpegang pada Syari'ah yang lebih tinggi dari penguasa yang tidak memungkinkan campur tangan penguasa walaupun terhadap hal-hal yang tidak dijelaskan secara pasti, karena hal itu merupakan kewenangan para ulama. Selain itu karena sistem *syura* berdasarkan pada Syari'ah ciptaan Tuhan tentu jauh dari hawa nafsu dan akan lebih adil dari sistem demokrasi modern yang bersandarkan pada hukum buatan manusia yang tidak bebas dari hawa nafsu.¹⁴⁸

- c. Kelompok ketiga yang menerima demokrasi sebagai bagian penting dari ajaran Islam.

Oleh karena itu menerima sepenuhnya demokrasi sebagai sesuatu yang universal. Diantara pemikir kelompok ini adalah Fahmi Huwaidi yang melakukan analisis secara lengkap dengan berbagai alasan yaitu,¹⁴⁹: *Pertama*, dalam beberapa hadis menunjukkan bahwa Islam menghendaki pemerintahan yang disetujui oleh rakyatnya. Ada tiga orang yang shalatnya tidak terangkat sejengkalpun dari atas kepalanya yaitu orang yang mengimami salat, sedangkan ia dibenci (H.R Ibnu Madjah). *Kedua*, penolakan Islam terhadap kediktatoran. Banyak ayat yang menunjukkan sikap

¹⁴⁸Taufiq asy-Syawi, *Fiqh al-Syura wa al-Istisyrarah*, terj., *Syura Bukan Demokrasi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 21 dan 23.

¹⁴⁹ Dikutip dalam Sukron Kamil, *Islam dan*, hlm. 53.

tersebut, seperti mengecam Namruz yang mengaku dirinya dapat menghidupkan dan mematikan seperti Tuhan dengan mendatangkan dua orang yang ditangkapnya di tengah jalan kemudian menetapkan hukum mati secara sewenang-wenang terhadap seseorang. *Ketiga*, pemilu merupakan kesaksian rakyat dewasa bagi kelayakan seseorang kandidat dan mereka tentu seperti yang diperintahkan al-Qur'an, mesti tidak menyembunyikan persaksiannya, mesti bersikap adil dan jujur serta tidak menjadi saksi-saksi palsu (Q.S 22: 30, 65: 2). *Keempat*, demokrasi merupakan sebuah upaya mengembalikan sistem kekhilafahan *Khulafa al-Rasyidin* yang memberikan hak kebebasan kepada rakyat yang hilang, ketika beralihnya sistem kekuasaan Islam kepada sistem kerajaan. *Kelima*, negara Islam adalah negara berkeadilan dan persamaan manusia didepan hukum. *Keenam*, *imamah* (kepemimpinan politik) menurut Al-Mawardi adalah kontrak sosial yang riil.

Oleh karena itu, kata Ibnu Hazm jika seseorang penguasa tidak mau menerima teguran, boleh diturunkan dari kekuasaan dan digantikan oleh yang lain. Ketika Fahmi Huwaidi merespon keberatan dua kelompok pemikiran yang menolak demokrasi dan yang mengakui ada perbedaan antara konsep Islam dan demokrasi adalah: *Pertama*, demokrasi memang gagasan Barat non muslim, tetapi kedudukannya sama dengan strategi parit sebagai tradisi Persia yang diadopsi Nabi dalam perang ahzab atau cap stempel yang diadopsi Nabi atau seperti sistem pajak. *Kedua*, demokrasi bukanlah penolakan akan kekuasaan Allah

atas manusia. *Ketiga*, suara mayoritas tidaklah identik dengan kesesatan. *Keempat*, legislasi dalam parlemen tidaklah berarti penentangan terhadap legislasi Tuhan. Penetapan suatu hal oleh parlemen hanyalah terhadap hal-hal yang belum diketahui secara pasti dalam agama. Menurut Zakaria Abdul Mun'im Ibrahim Al-Khatib, syura sebagai sistem politik Islam sama dengan demokrasi baik secara asas maupun kelembagaan atau prosedurnya, meskipun keduanya berbeda dalam sumber. Jika *syura* bersumber pada wahyu, sedangkan demokrasi dari pemikiran manusia. Secara asas keduanya mendasarkan pada tiga hal yaitu: *Pertama*, prinsip persamaan. Sebagaimana demokrasi Islam menetapkan bahwa semua manusia sama dan tidak menjadikan jenis kelamin, warna kulit dan status sosial sebagai sesuatu yang menjadikan seseorang istimewa. *Kedua*, prinsip kebebasan yang dijamin oleh Islam, seperti kebebasan individu. *Ketiga*, prinsip hak-hak politik pengawasan rakyat, karena kepemimpinan adalah kontrak sosial, hak memilih rakyat seperti dinyatakan oleh Ibnu Qudamah bahwa kekuasaan diperoleh melalui pemilihan dan hak pencalonan diri.

Larangan meminta jabatan sebagaimana dalam hadis Muslim menurut Al-Khatib adalah larangan ambisius atau rakus. Dari sisi kelembagaan antara Islam dan demokrasi juga sama. Penguasa dalam Islam ditetapkan melalui pemilihan oleh lembaga *syura* (perwakilan) seperti penetapan Abu Bakar sebagai Khalifah. Lembaga *syura* (parlemen) juga bertugas mengawasi dan meminta pertanggungjawaban imam apabila imam tidak lagi bertanggungjawab, maka

lembaga dibolehkan menurunkan jabatan imam. Demikian pula rakyat boleh mengajukan keberatan terhadap kebijakan imam atau keputusan lembaga *syura*. Islam juga membolehkan adanya partai, tetapi dengan syarat dapat menjaga persatuan umat Islam.¹⁵⁰

Dengan demikian, terdapat beberapa kesamaan antara *syura* dan demokrasi yang tentu perlu menjadi pertimbangan bagi umat Islam untuk mengambil manfaat dari sistem ini untuk kemajuan kehidupan bernegara dan berbangsa dalam konteks Islam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan dapat diberlakukan pada setiap negara sesuai dengan situasi dan kebutuhan negara terhadap salah satu sistem yang tersedia. Proses pembentukan sebuah negara demokrasi memerlukan kriteria yang cukup banyak dan dalam waktu yang lama, terutama peralihan dari negara non demokrasi ke negara demokrasi.

Dalam perjalanan sejarah perpolitikan Indonesia, demokrasi Pancasila yang sudah diterapkan sesuai dengan watak dan karakter bangsa Indonesia sehingga merupakan sistem demokrasi yang tepat.

b. Sistem politik otokrasi tradisional

Sistem politik otokrasi tradisional ialah sistem politik yang telah diterapkan oleh negara-negara di dunia ini dengan ciri-ciri: *Pertama*, kebaikan bersama. Faktor kebaikan bersama menyangkut pemahaman mengenai dua hal, yaitu persamaan dan kebebasan politik individu. Selain itu perbandingan kebutuhan materiil dengan moril dan kolektivisme dengan

¹⁵⁰ Dikutip dalam Sukron Kamil, *Islam dan*, hlm. 58.

individualisme. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah: (1) kurang menekankan pada persamaan, tetapi menekankan pada stratifikasi ekonomi (2) kebebasan politik individu kurang dijamin, tetapi lebih menekankan pada perilaku yang menuruti kehendak kelompok kecil penguasa (3) kebutuhan moril dan nilai-nilai moral lebih menonjol daripada kebutuhan materiil dan lebih menekankan pada kolektivisme yang berdasarkan kekerabatan daripada individualisme.

Kedua, identitas bersama. Faktor yang mempersatukan masyarakat dalam sistem politik primordial seperti suku bangsa, ras dan agama. Faktor primordial sering terjelma dalam pribadi pemimpin, sehingga pemimpin menjadi lambang kebersamaan dalam suku bangsa, ras atau agama. Oleh karena itu, ikatan keturunan, dan suku bangsa atau ikatan agama yang terwujud dalam diri seorang pemimpin yang dominan (otokrat) seperti sultan, raja atau kaisar telah menjadi identitas bersama.

Ketiga, hubungan kekuasaan. Kekuasaan dalam sistem ini cenderung bersifat pribadi, negatif dan sebagian kecil lagi bersifat konsensus.

Keempat, legitimasi kewenangan. Kewenangan otokrat bersumber dan berdasarkan tradisi. Ia memiliki kewenangan karena ia merupakan keturunan dari pemimpin terdahulu. Para pendahulunya dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang harus memerintah, karena asal identitas - pribadinya. Kepercayaan tradisi ini selalu dipelihara dan dipertahankan oleh keturunan otokrat dengan berbagai cara, seperti dengan mitos, legenda dan simbol-simbol tertentu. Disisi lain anggota masyarakat mengakui dan menaati kewenangan otokrat karena

tradisi yang turun-temurun. *Kelima*, hubungan ekonomi dan politik. Selain terdapat jurang politik (kekuasaan) yang lebar antara penguasa dan penduduk di pedesaan dalam sistem atokrasi tradisional inipun terdapat jurang yang lebar dalam ekonomi, yaitu antara otokrat dan kelompok kecil elite penguasa yang mengitarinya yang sekaligus juga pemegang kekayaan dan massa petani yang tidak memiliki apa-apa selain tenaga mereka. Para petani kebanyakan bertindak sebagai penggarap tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh tuan tanah. Produk ekonomi berkisar pada pertanian subsistem, yaitu kegiatan yang menghasilkan total produksi yang cukup untuk kehidupan sehari-hari. Tanah dikuasai oleh tuan tanah sebagai sumber ekonomi dan kekuasaan sangat pincang.¹⁵¹

c. Sistem Politik Totaliter atau Otoriter

Sistem politik yang sangat menekankan konsensus total, walaupun konflik total dengan musuh-musuh dapat terjadi baik diluar maupun dalam negeri. Untuk mencapai konsensus total dilakukan dengan indoktrinasi dan pemaksaan kekuasaan. Dua sistem politik yang tercakup di dalamnya adalah Komunis dan Fasis. Kedua sistem ini dalam mengatur masyarakat dilakukan secara total atau menyeluruh oleh kelompok kecil yang memonopoli kekuasaan. Untuk membentuk masyarakat baru dan melaksanakan kebijakan penguasa, kedua sistem ini menggunakan sistem mobilisasi massa. Demikian juga kepentingan individu

¹⁵¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu.....*, hlm. 223.

berada dibawah kepentingan partai tunggal yang mewakili Negara.¹⁵²

Menurut Peter Schroder, sistem otoriter memiliki persamaan dengan sistem totaliter, yaitu bahwa keduanya tidak demokratis. Pengertian “sistem otoriter” tidak memiliki makna yang jelas. Pengertian ini mencakup berbagai rezim yang berbeda yang termasuk sistem otoriter adalah diktator militer kiri maupun kanan. Dalam sistem ini pemilu seringkali dimanipulasi. Namun berbeda dari sistem totaliter yang memainkan peran disini bukanlah cara pandang mereka terhadap dunia, melainkan pengamanan kekuasaan. Untuk menyelubungi hal ini prularisme terbatas pun diperbolehkan, namun tentu saja sejauh hal ini tidak mengancam sistem yang ada. Disini mereka tidak dipersatukan oleh adanya cara pandang yang sama terhadap dunia. Oleh karena itu, partai pemerintah juga tidak memainkan peranan yang terlalu menentukan dan seringkali digantikan oleh kumpulan penguasa yang didasari oleh hubungan pribadi.¹⁵³ Menurut Huntington dan Finer, bahwa ciri sistem politik yang otoriter adalah paternalistik serta nepotistik yang juga berdasarkan pada pola *patron-client* menyebabkan militer menjadi pengayom hampir semua kegiatan politik (organisasi), sementara struktur keamanan mereka ikut mengawasi birokrasi dengan model struktur pemerintahan ganda atau bayangan.¹⁵⁴

¹⁵² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu.....* , hlm. 225.

¹⁵³ Peter Schroder, *Strategi Politik*, (Jakarta: tp, 2003), hlm. 29.

¹⁵⁴ Ikrar Nusa Bhakti, et al, *Tentara Mendambakan Mitra: Hasil Penelitian LIPI tentang Pasang Surut Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Kepartaian di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 42.

Sistem otoriter menurut Georg Sorensen memiliki tiga tipe yakni: *Pertama*, rezim pembangunan otoriter. Ciri khas rezim ini adalah kemampuannya dalam meningkatkan pertumbuhan maupun kesejahteraan. Pemerintah berorientasi pada reformasi dan memperoleh otonomi yang besar dari kepentingan-kepentingan pribadi elite. Pemerintah mengendalikan aparat negara dengan kapasitas birokratis dan organisasional untuk memajukan pembangunan dan dijalankan oleh elite-elite negara yang secara ideologis bertekad mempercepat pembangunan ekonomi dalam pengertian baik pertumbuhan maupun kesejahteraan. *Kedua*, rezim pertumbuhan otoriter. Suatu pemerintahan yang didominasi oleh elite yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak meningkatkan kesejahteraan. *Ketiga*, rezim penyuburan elite negara otoriter. Tipe *rezim-authoritarian state elite enrichment* (ASEE) tidak meningkatkan pertumbuhan ataupun kesejahteraan, sasaran utamanya adalah lebih pada penyuburan elite yang mengontrol negara. Rezim ini seringkali berdasarkan pada pemerintahan otokratis yang dipimpin oleh seorang pemimpin tertinggi. Walaupun tindakan pemimpin tidak masuk akal ketika dinilai dengan standar tujuan pembangunan formal yang telah direncanakan oleh rezim, tindakan-tindakan tersebut masih bisa dimaklumi jika dilihat dari kacamata patronase dan politik klientelisme.¹⁵⁵ Setidaknya faktor yang

¹⁵⁵Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Center of Critical Social Studies, 2003), hlm. 142-143.

mempengaruhi berakhirnya rezim otoritarian menurut Ign. Ismanto dkk adalah tekanan demokratisasi dari elemen-elemen yang berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi dan krisis ekonomi.¹⁵⁶

Rezim Totaliter menurut Peter Schroder dalam tipologi Totalitarianisme ditandai oleh hal-hal berikut ini: *Pertama*, hanya terdapat satu partai yang tidak memperoleh kekuasaan dari para pemilih dan yang tidak memandang kehendak rakyat sebagai batas kekuasaannya. Partai ini justru menganggap bahwa tugas mereka adalah membentuk kehendak rakyat sesuai dengan bayangan mereka sendiri. *Kedua*, yang menjadi dasar untuk itu adalah cara pandang mereka terhadap dunia yang dapat dipersamakan/serupa dengan sebuah agama. Cara pandang ini memberi legitimasi bahwa mereka adalah “benar” dan bahwa mereka tidak hanya sebatas mengenal kondisi ideal masyarakat, melainkan juga dapat mewujudkan dalam batas waktu tertentu. *Ketiga*, dalam sistem yang totaliter para warga harus menerima cara pandang dunia yang dimiliki oleh para penguasa. Mereka tidak diperbolehkan menarik diri ke dalam ruang gerak bebas mereka dan memilih untuk tidak ikut terlibat.¹⁵⁷ Rezim otoriter membatasi partisipasi politik secara ketat dan

¹⁵⁶ Ign. Ismanto, et al, *Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004 Dokumentasi, Analisis dan Kritik*, (Jakarta: Kementerian Riset dan Teknologi dan Departemen Perubahan Sosial CSIS, 2004), hlm. 24.

¹⁵⁷ Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, hlm. 281, lihat juga Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu.....*, hlm. 225, lihat juga Peter Schroder, *Strategi.....*, hlm. 292.

penguasa dalam sistem otoriter sangat membenci pemimpin oposisi dan partai politik tertentu.¹⁵⁸

d. Rezim Diktator

Menurut Franz L. Neuman, bahwa rezim diktator adalah pemerintahan oleh seseorang atau kelompok orang yang menyombongkan diri dan memonopoli kekuasaan dalam negara dan melaksanakannya tanpa batas. Tipe diktator dengan kekuasaan ruang lingkup yang dimonopoli adalah: *Pertama*, Diktator Sederhana. Diktator hanya dapat melaksanakan kekuasaannya melalui pengendalian yang absolut atas sarana -sarana pemaksa tradisional saja yaitu militer, polisi, birokrasi dan peradilan. *Kedua*, diktator Kaisaristik. Dalam beberapa situasi diktator dapat merasa dipaksa untuk membangun dukungan masyarakat, mendapatkan basis massa baik demi mencapai kekuasaan maupun demi pelaksanaan kekuasaan atau demi keduanya sebagaimana ditunjukkan oleh namanya selalu berbentuk diktator personal. *Ketiga*, Diktator Totaliter yang merupakan kombinasi paksaan dan dukungan rakyat ini tidaklah cukup sebagai jaminan kekuasaan. Mungkin perlu mengendalikan pendidikan, sarana komunikasi dan lembaga-lembaga ekonomi dan karenanya memacu seluruh masyarakat dan kehidupan pribadi warga negaranya kepada sistem dominasi politik. Diktator ini

¹⁵⁸ Samuel Huntington, *Gelombang Dunia Ketiga*, terj., (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafitri, 1997), hlm. 217.

dapat bersifat kolektif atau personal yakni dapat atau tidak dapat mempunyai suatu unsur kaisaristik.¹⁵⁹

Sistem politik diktator memiliki ciri-ciri: *Pertama*, tidak ada pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif dan eksekutif. *Kedua*, segala keputusan politik ditentukan sendiri oleh penguasa. *Ketiga*, tidak ada pergantian pemerintahan secara normal dan tidak ada pemilu yang langsung umum dan bebas. *Keempat*, komunikasi antara pemerintah dengan rakyat dilakukan secara tertutup. *Kelima*, mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. *Keenam*, hanya ada satu partai politik milik pemerintah atau tidak ada sama sekali. *Ketujuh*, tidak ada keikutsertaan rakyat secara langsung. *Kedelapan*, rakyat kehilangan kemerdekaan pribadi.¹⁶⁰

Ketika membahas masalah politik, maka tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang negara. Karena politik itu sendiri adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan, serta segala urusan dan tindakan, seperti kebijakan mengenai pemerintahan negara.¹⁶¹ Negara menurut Mahmud Helmy adalah kumpulan manusia yang tinggal menetap disuatu wilayah tertentu yang diperintah oleh institusi pemerintahan yang mengatur urusan mereka didalam

¹⁵⁹Franz L. Nauman, Teori Diktator, Sebuah Catatan, dalam Roy C. Macridis dan Bernar E. Brown (Eds), *Perbandingan Politik*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm.182.

¹⁶⁰Sukarna, *Perbandingan Sistem Politik*, (Bandung: PT Adytya,1990), hlm. 13-14.

¹⁶¹Dep. Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa*, hlm. 886.

dan diluar.¹⁶² Menurut Aristoteles negara adalah kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan.¹⁶³ Seorang ahli hukum tata negara Mesir, Wahid Ra'fah menyebut bahwa negara adalah sekumpulan masyarakat yang hidup di suatu wilayah tertentu yang tunduk kepada suatu pemerintahan yang teratur yang bertanggungjawab memelihara keberadaan masyarakat, mengurus kepentingannya dan kemaslahatan umum. Sedangkan Belanda seorang doktor Inggris merumuskan negara sebagai kumpulan individu yang tinggal di suatu wilayah tertentu yang bersedia tunduk kepada kekuasaan mayoritas atau kekuasaan satu golongan dalam masyarakat.¹⁶⁴ Negara dalam pandangan Deliar Noer adalah bentuk ikatan antar manusia atau bentuk kumpulan yang pada akhirnya dapat menggunakan paksaan terhadap anggota-anggotanya.¹⁶⁵

Miriam Budiarjo merumuskan bahwa negara merupakan suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut warga negaranya taat kepada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (*control*)

¹⁶²Mahmud Hilmy, *Nidham al-Hukm al-Islamy*, (Kairo: Dar-Al-Huda, 1978), hlm. 9.

¹⁶³ Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 90-91.

¹⁶⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 131.

¹⁶⁵ Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, (Medan: Dwipa, 1965), hlm. 41. Lihat pula Inu Kencana Syafi'i, *Al-Quran dan Ilmu Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 141-144.

monopolitis dari kekuasaan yang sah.¹⁶⁶ Dengan demikian, negara mengandung empat unsur pokok yaitu: (1) rakyat atau sejumlah orang (2) wilayah geografis atau teritorial (3) pemerintahan (yang berdaulat) dan (4) pengakuan masyarakat internasional.

Hubungan antara penguasa dengan warga negara perlu diatur dengan sistem politik. Sistem politik didefinisikan sebagai setiap pola hubungan manusia yang kokoh dan melibatkan pengaruh, kekuasaan dan kewenangan,¹⁶⁷ yang diarahkan kepada tujuan seluruh warga masyarakat (*public goals*) bukan tujuan pribadi (*private goals*).¹⁶⁸

Oleh karena substansinya adalah *public goals*, maka politik memiliki kaitan erat dengan berbagai komponen yang membentuknya, seperti negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijaksanaan (*policy*) dan pembagian tugas (*distribution*).¹⁶⁹ Namun sarjana politik menempatkan negara sebagai titik sentral kehidupan politik. Hal ini sejalan dengan pandangan Barents sebagaimana dikutip Miriam Budiarjo, bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian kehidupan masyarakat.¹⁷⁰

Tujuan pembentukan negara menurut al-Mawardi mengganti ke-Nabian dalam rangka

¹⁶⁶ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu*....., hlm. 40.

¹⁶⁷ Robert A. Dahl, *Analisis Politik*....., hlm. 4.

¹⁶⁸ David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, alih bahasa Yasogama (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 7.

¹⁶⁹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar*....., hlm. 9.

¹⁷⁰ David E. Apter, *Pengantar Analisa*....., hlm. 7.

memelihara agama dan mengatur dunia.¹⁷¹ Sedangkan menurut Yusuf Musa bahwa tujuan negara dalam Islam yaitu: *Pertama*, memberi penjelasan keagamaan yang benar dan menghilangkan keraguan terhadap hakikat Islam kepada seluruh umat manusia, mengajak manusia kepada Islam, melindungi manusia dari tindakan-tindakan agresor dan membela syari'at Islam dari orang-orang yang berusaha melanggarnya. *Kedua*, melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dengan landasan saling menolong dan memenuhi sarana kehidupan manusia, sehingga mereka menjadi satu kesatuan yang kokoh. *Ketiga*, melindungi wilayah Islam dari serangan musuh dan melindungi warganya dari segala bentuk kezaliman.¹⁷²

Dalam kalangan umat Islam terdapat tiga konsep tentang negara, yaitu: *Pertama*, Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, melainkan agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Penganut pendirian ini umumnya berpandangan bahwa: (1). Islam adalah agama yang serba lengkap di dalamnya terdapat pula sistem ketatanegaraan atau sistem politik. Oleh karena itu, dalam bernegara umat Islam harus kembali kepada ketatanegaraan Islam dan tidak perlu atau bahkan tidak meniru sistem ketatanegaraan Barat.

¹⁷¹ Abu Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 5.

¹⁷² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*....., hlm. 135.

(2). Sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem yang telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dan *al-Khulafā al-Rāsyidūn*. Pandangan ini secara tegas menyatakan bahwa pembentukan negara Islam sebagai kewajiban (*absolute*) yang pengingkarnya mengakibatkan dosa *eskatologis*. *Kedua*, Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur. Nabi diutus tidak dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai negara, karena Islam tidak mengatur persoalan kenegaraan, umat Islam harus menerapkan konsep barat (negara sekular) yang telah terbukti menyejahterakan rakyat. *Ketiga*, menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap yang di dalamnya terdapat sistem kenegaraan dan menolak pula anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Maha Pencipta. Pendirian ketiga ini berpandangan bahwa Islam tidak memiliki sistem ketatanegaraan, tetapi memiliki seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.¹⁷³ Pendirian ini tidak mementingkan syari'at Islam sebagai bentuk dan dasar negara, tetapi mementingkan aktualisasi kode etik-moral Islam dalam

¹⁷³Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata.....*, hlm. 1-2.

elaborasi kenegaraan.¹⁷⁴ Berdasarkan pendirian itu telah melahirkan berbagai konsep negara, seperti monarki, republik, negara kesatuan, federasi, demokrasi, teokrasi, negara Islam dan negara sekular.

Kajian kenegaraan masuk dalam wilayah legislasi metodologi ushul fiqih yang dikenal dengan *al-qawā'id al-uṣūliyyah al-tasyr'iyyah* yang berkaitan dengan tujuan disyariatkannya fikih, yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia. Menurut Ibnu Taimiyyah (661-728H/1263-1330M) al-Qur'an tidak menegaskan satu konstitusi apapun tentang pemerintahan (*khilāfah, imāmah*). Tidak ada ayat al-Qur'an dan as-Sunnah secara konkrit membicarakan konsep negara.¹⁷⁵

Din Syamsudin menggunakan tiga polarisasi pendekatan,¹⁷⁶ untuk mengkaji konsep Negara yaitu: *Pertama, Skripturalistik* dan rasionalistik. Pola ini berhubungan dengan pendekatan terhadap sumber Islam, al-Qur'an dan as-Sunnah terutama menyangkut metode penafsiran. Kecenderungan *skripturalistik* menampilkan pemahaman yang bersifat tekstual dan literal, yaitu penafsiran yang mengandalkan pengertian bahasa. Sedangkan rasionalistik cenderung menampilkan penafsiran rasional dan kontekstual. *Kedua, Idealistik* dan realistik. Idealistik melakukan

¹⁷⁴Lihat juga S. Waqar Ahmad Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam* alih bahasa dari *Islamic Environmental System Engineering* oleh Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka Salman ITB, 1983), hlm. 217-232.

¹⁷⁵ Qomaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyyah*, (Bandung: Pustaka Salman, 1995), hlm. 116.

¹⁷⁶ M. Din Syamsudin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: PT. Logos, 2000), hlm. 66-67.

idealisasi terhadap ajaran. Untuk pemikiran kenegaraan pendekatan ini menawarkan nilai-nilai Islam yang ideal. Sedangkan realistik lebih bersifat kompromistik dengan cara menerima dan mengoreksi melalui pemberian isyarat dan pesan moral. Ada dua kemungkinan dari pendekatan realistik yaitu melegitimasi kekuasaan atau mengoreksinya. *Ketiga, Formalistik dan substantivistik.* Formalistik mementingkan bentuk dari pada isi. Pendekatan ini menampilkan konsep tentang simbolisme keagamaan. Pendekatan substantivistik justru sebaliknya yaitu menekankan isi dari pada bentuk.

1.6.5 Teori Gerakan Sosial dan Politik

Gerakan secara umum dapat didefinisikan sebagai kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang malah ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali dengan menggunakan cara-cara politik.¹⁷⁷ Gerakan sosial menurut Tom Bottomore pada hakikatnya adalah suatu fenomena masyarakat modern dan suatu perjuangan untuk memperoleh kebebasan sosial yang lebih besar yang mencapai puncaknya dalam perjuangan kelas kaum proletar.¹⁷⁸

Definisi yang tidak jauh berbeda dikemukakan Blumer, bahwa gerakan sosial sebagai suatu kegiatan bersama untuk menentukan suatu tatanan baru dalam

¹⁷⁷ Meriam Budiarto, *Dasar-Dasar.....*, hlm. 162.

¹⁷⁸ Tom Bottomore, seperti dikutip Yaya Mulyana, *Elit Masyarakat Sipil dan Politik Lokal: Studi Tentang Gerakan Sosial Pembentukan Provinsi Banten*, Tesis S-2 Ilmu Politik Program Pascasarjana UGM, 2001, hlm. 65.

kehidupan. Gerakan sosial muncul ketika suatu kondisi penuh kegelisahan karena perasaan ketidakpuasan terhadap kehidupan sehari-hari, adanya keinginan dan harapan untuk dapat meraih tatanan kehidupan baru.¹⁷⁹ Gerakan sosial adalah seperangkat keyakinan dan tindakan yang tidak terlembaga yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau menghadapi perubahan dalam sebuah masyarakat. Keyakinan dan tindakan yang tidak terlembaga dimaksudkan bahwa mereka tidak diakui sebagai sesuatu yang berlaku dan diterima umum secara luas dan sah di dalam sebuah masyarakat. Namun bagi para pengikut dan pendukung gerakan sosial tersebut bahwa keyakinan dan praktik-praktik yang mereka lakukan didefinisikan secara positif.¹⁸⁰ Sedangkan Turner and Killian mengemukakan bahwa gerakan sosial adalah usaha bersama untuk meningkatkan atau menentang perubahan dalam masyarakat.¹⁸¹

Terdapat berbagai macam tipe gerakan sosial yaitu: gerakan sosial yang berkiblat kepada nilai-nilai dan gerakan sosial yang berkiblat kepada norma-norma. Gerakan sosial yang berorientasi pada nilai-nilai adalah gerakan yang memfokuskan pada perubahan nilai-nilai dan asas yang menjadi landasan dari aturan-aturan. Sedangkan gerakan sosial yang berorientasi pada norma-norma adalah gerakan sosial yang mengubah kaidah-kaidah atau aturan

¹⁷⁹ Herbert Blumer, seperti dikutip Yaya Mulyana, *Elit Masyarakat Sipil dan Politik Lokal: Studi Tentang.....*, hlm. 68.

¹⁸⁰ Robert Mirel, *Teori Pergerakan Sosial*, (Yogyakarta: Resist Book, 2004), hlm. 7.

¹⁸¹ Ralph H Turner and Lewis M Killian, seperti dikutip Yaya Mulyana, *Elit Masyarakat Sipil dan Politik Lokal: Studi Tentang Gerakan.....*, hlm. 73.

yang ada dalam masyarakat pada pranata dan lembaga sosial.¹⁸²

Sekurang-kurangnya terdapat lima faktor penyebab timbulnya gerakan sosial menurut Myron Weiner,¹⁸³ yaitu: *Pertama*, modernisasi. Komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkat, penyebaran kepandaian baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media komunikasi massa. Kemampuan para pedagang dan kaum profesional mempengaruhi nasib mereka sendiri akan mendorong mereka untuk ikut dalam kekuasaan politik. *Kedua*, perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Terbentuknya suatu kelas pekerja baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah dalam masa proses industrialisasi dan modernisasi, seperti tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik akan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik. *Ketiga*, pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern. Sistem transformasi dan komunikasi modern telah mempercepat dan memudahkan penyebaran ide-ide baru kaum intelektual seperti sarjana, filosof dan pengarang, seperti ide egalitarianisme dan nasionalisme kepada masyarakat umum untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik. *Keempat*, konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik. Strategi yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang

¹⁸² M. M. Billah, "Gerakan Keagamaan dan Penguatan Masyarakat Sipil di Indonesia: Telaah Terhadap Peran Ormas Islam di Indonesia" dalam M. Dawam Raharjo (ed), *Mewujudkan Satu Umat*, (Jakarta: Pustaka Zaman, 2002), hlm. 36.

¹⁸³ Myron Weiner, seperti dikutip Gabriel Almond, *Sosialisasi, Kebudayaan dan Partisipasi Politik*, dalam Mochtar Mas'ud dan Collin Mc. Andrew, *Perbandingan Sistem.....*, hlm. 42-43.

berkompetisi memperebutkan kekuasaan adalah dengan mencari dukungan rakyat. Memperjuangkan ide-ide partisipasi massa yang akibatnya menimbulkan gerakan-gerakan yang menuntut agar hak-hak ini dipenuhi adalah aktivitas yang mereka anggap sah. *Kelima*, keterlibatan pemerintah dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang-bidang kebijaksanaan baru telah mengakibatkan tindakan-tindakan pemerintah semakin menyusup ke segala segi kehidupan rakyat sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Adapun hal-hal yang melekat dalam sebuah gerakan sosial menurut George Ritzer,¹⁸⁴ yaitu: *Pertama*, suatu gerakan sosial melibatkan sebagian besar individu yang berusaha memprotes suatu keadaan. Agar dapat dikategorikan sebagai suatu gerakan sosial, maka usaha sejumlah individu itu harus memiliki persyaratan dasar dari suatu organisasi. *Kedua*, suatu gerakan sosial harus memiliki ruang yang relatif luas yang mungkin berawal dari ruang yang kecil, kemudian mampu mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. *Ketiga*, gerakan sosial dapat menggunakan berbagai macam taktik untuk mencapai tujuannya. Mulai dari taktik yang tidak menggunakan kekerasan sampai dengan yang menggunakan kekerasan. *Keempat*, meskipun dalam gerakan sosial didukung oleh individu-individu tertentu, namun tujuan akhir dari gerakan sosial adalah merubah kondisi suatu masyarakat. *Kelima*,

¹⁸⁴ George Ritzer, seperti dikutip Abdul Aziz, *Politik Fundamental Majelis Mujahidin dan Cita-Cita Penegakan Syari'at Islam*, (Yogyakarta: Institut Internasional Studies, Fisipol UGM, 2011), hlm. 37.

gerakan sosial merupakan suatu usaha yang secara sadar dilakukan untuk mengadakan perubahan sosial, akan tetapi mereka yang terlibat di dalamnya mungkin tidak menyadari akan tindakannya walaupun menyadari tujuan utama dari gerakan tersebut.

Gerakan-gerakan yang muncul berbeda dengan *mainstream* yang sering juga dianggap sebagai gerakan sempalan. Dalam fenomena Islam, gerakan keagamaan sering dalam bentuk mistik atau tarekat dan dianggap menyimpang dari ajaran pokok dalam Islam, seperti munculnya fenomena gerakan Ahmadiyah.¹⁸⁵

Munculnya gerakan keagamaan itu karena ketidakpuasan pada tokoh agamanya yang suka ikut politik dan tidak membawa perubahan kehidupan agama. Para aktivis gerakan yang dianggap gerakan sempalan adalah orang-orang yang masih baru berusaha menjalankan ajaran agama secara utuh, para *mukallaf* dan orang-orang yang berasal dari keluarga sekuler atau abangan yang sedang mencari identitas dirinya dalam Islam. Orang yang baru seperti ini sering cenderung mencari ajaran yang murni, sederhana, dan tegas tanpa memperhatikan situasi dan kondisi.¹⁸⁶

Aktivis gerakan Islam ini dilatarbelakangi oleh pendidikan dan pengetahuan agama mereka yang rendah, tetapi memiliki semangat keagamaan yang tinggi. Diantara mereka ada yang memiliki sikap yang sangat idealis dan dorongan untuk mengabdikan kepada agama dan masyarakat.

¹⁸⁵Iskandar Zulkarnaen, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, (Yogyakarta: LKis, 2006), hlm. 320.

¹⁸⁶Martin Van Bruinessen, *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999), hlm. 265.

Mereka menyadari bahwa problem sosial yang dihadapi adalah seperti korupsi, kemaksiatan dan sebagainya. Untuk mengatasi problem tersebut mereka meyakini bahwa Islam sangat relevan untuk mengatasinya dan mengaggap bahwa Islam mempunyai jawaban yang sederhana, jelas dan konkret atas semua permasalahan manusia.¹⁸⁷

Seiring dengan terjadinya perkembangan sosial, maka perkembangan gerakan sosial mengalami perubahan-perubahan. Gerakan-gerakan kontemporer pada saat ini cenderung mengedepankan cara yang lebih rasional dengan mengesampingkan tindakan kekerasan. Kecenderungan para aktivis melakukan tindakan lebih rasional dan hampir tindakan-tindakan itu harus dilakukan oleh organisasi-organisasi gerakan agar mampu mencapai tujuan secara efektif. Masyarakat menjelang akhir abad XX sebagai masyarakat yang berciri organisasi, menjadi faktor penyebab lain kecederungan aktivis gerakan sosial memilih cara yang lebih rasional dalam mencapai tujuannya.¹⁸⁸

Untuk mencapai tujuan dari sebuah gerakan sosial diperlukan persyaratan sebagaimana pendapat Timur Mahardika,¹⁸⁹ yaitu: *Pertama*, gerakan tidak membiarkan dirinya dalam situasi *stagnan*, sehingga upaya untuk mengembangkan terus dilakukan. Elemen gerakan tidak menjadikan dirinya sebagai benda mati, tetapi harus bisa menciptakan bagi gerakannya. *Kedua*, adanya organisasi yang kuat dengan jaringan kerja yang luas menjadi penopang dan memiliki kemampuan mengorganisasi

¹⁸⁷ Martin Van Bruinessen, *Rakyat Kecil, Islam.....*, hlm. 266.

¹⁸⁸ Robert Mirsel, *Teori Pergerakan.....*, hlm. 63, 66.

¹⁸⁹ Timur Mahardika, seperti dikutip Yaya Mulyana, *Elit Masyarakat Sipil dan Politik....*, hlm.. 68.

dukungan rakyat. *Ketiga*, perlunya selektif dalam perekrutan agar pendukung gerakan benar-benar orang-orang yang memahami ideologi gerakan. *Keempat*, organisasi gerakan hendaklah selalu mengembangkan kaderisasi dan ekspansi yang terus menerus. *Kelima*, organisasi gerakan perlu mengembangkan atribut organisasi, baik untuk memperkuat konsolidasi maupun sebagai perekat para partisipan. *Keenam*, pencapaian tujuan gerakan biasanya memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu perlu rumusan yang jelas tentang masa depan yang diharapkan agar penggunaan energi dapat diarahkan secara efektif.

Gerakan sosial menurut Neil J. Smelser muncul melalui enam tahap perkembangan yaitu:¹⁹⁰ *Pertama*, *structural conduciveness* menunjuk pada suatu kondisi atau keadaan yang memungkinkan munculnya suatu gerakan sosial. *Kedua*, *structural strain* muncul sebagai hasil beberapa perubahan pendek. Menurut Smelser bahwa *ambiguitas*, *deprivasi*, konflik dan kesenjangan merupakan tipe-tipe utama *structural strain* yang di dalamnya terdapat individu atau kelompok merasa kehilangan makna hidup. Tahap ini memberikan landasan bagi perluasan kepercayaan umum yang diidentifikasi sebagai sumber ketegangan dan respon untuk mengatasinya. Tahap ini juga memberikan diagnosis sementara terhadap keterpurukan sosial. Maka dalam proses ini gerakan sosial tengah dalam proses pembentukan. *Ketiga*, *spread of generalized belief* sebagai kesinambungan dari *structural strain*. Proses ini memberikan diagnosis

¹⁹⁰Neil J Smelser, dalam Marx N Hagopian seperti dikutip Yaya Mulyana, *Elit Masyarakat...*, hlm. 68

singkat atas terjadinya berbagai keterpurukan sosial. Sebelum kepercayaan umum ini muncul, setiap individu telah merasakan penderitaan dan isolasi kenyataan yang memilukan. Sekarang akar penyebab kekecewaan itu telah ditemukan, meskipun tentu merupakan kesimpulan simplistik, tetapi jelas sebuah gerakan sosial kemudian terbentuk. *Keempat, precipitating factors* baik karena faktor kerusakan, kejatuhan ekonomi ataupun yang lainnya memberikan bukti konkret terhadap substansi kepercayaan umum, sehingga melahirkan gerakan sosial yang bersifat spontan. *Kelima, mobilization of participants for action* merupakan tahap setelah berlangsungnya suatu peristiwa yang menyulut sentimen dan rasa solidaritas massa. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka massa atau anggota masyarakat dibujuk untuk terlibat dalam suatu gerakan. Dalam hal ini peran pemimpin untuk memobilisasi dan mengorganisasi massa sangatlah penting. Tanpa pengaruh dari pemimpin terhadap anggota masyarakat untuk bergerak, maka akan mudah sekali rintisan munculnya suatu gerakan sosial dapat digagalkan. *Keenam, application of sosial control* adalah diterminan berikutnya dari suatu gerakan sosial. Kontrol sosial pada umumnya dilakukan oleh mereka yang memegang kekuasaan yang ada pada tangan penguasa, digunakan untuk menghancurkan gerakan atau justru kontrol sosial tadi menjadikan gerakan sosial tersebut semakin berkembang, yang menunjukkan solidaritas para pengikut gerakan semakin tinggi.

Sedangkan menurut Blumer terdapat lima tahapan perkembangan suatu gerakan sosial yaitu:¹⁹¹ *Pertama*, agitasi yang berperan paling signifikan dalam permulaan suatu gerakan sosial. Agitasi beroperasi dalam dua situasi yaitu situasi adanya penyimpangan, ketidakadilan sosial, diskriminasi sosial serta situasi keresahan dan kekecewaan masyarakat. *Kedua*, pengembangan *sprit decorp* untuk mengorganisasi perasaan senasib sepenanggungan dalam rangka membangun antusiasme kelompok. *Ketiga*, pengembangan moral. *Keempat*, pengembangan ideologi kelompok. *Kelima*, peran taktik untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

Bahwa gerakan Islam adalah gerakan keagamaan yang muncul dari pergeseran orientasi keagamaan dan ketidakpuasan terhadap organisasi-organisasi ekstra kampus yang menyuguhkan kegiatan sekuler dan juga terhadap dua organisasi sosial keagamaan besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang dianggap tidak concern mengubah masyarakat menjadi Islami.¹⁹²

Gerakan politik adalah gerakan sosial kemasyarakatan dibidang politik yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan negara dan menguasai negara dengan cara-cara yang prosedural maupun non-prosedural, bahkan akan membentuk suatu negara tertentu.¹⁹³ Adapun gerakan politik Islam ialah gerakan politik yang bertujuan

¹⁹¹ Herbert Blumer, dalam Barry Mc. Laughlin, seperti dikutip Yaya Mulyana, *Elit Masyarakat.*, hlm. 71.

¹⁹²Edy A. Efendi, "Pergeseran Orientasi Sikap Keberagamaan di Kampus-Kampus Sekuler" dalam *Ulumul Qur'an*, No. 3 Vo.IV (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1993), hlm. 12.

¹⁹³ Sudarno Sobron, *Dinamika Gerakan Politik Hizbut Tahrir.....*, hlm. 40.

untuk menegakkan syariat Islam dan konsep-konsep politik Islam dalam lingkup negara, menentang pemisahan urusan agama dengan negara yang dianggap sekuler dan melawan segala bentuk penjajahan (*imperialisme*) serta penindasan kepentingan Islam, baik di negara Islam maupun negara yang berpenduduk mayoritas Islam.¹⁹⁴

Setiap gerakan sosial, politik, kebudayaan dan massa tidak lepas dari faktor-faktor yang selalu melingkari gerakan tersebut yaitu: *Pertama*, *setting* (sejarah) sosial politik lahirnya gerakan tersebut baik lingkup global maupun nasional. *Kedua*, aktor perintis berdiri gerakan. *Ketiga*, sistem nilai yang dianut oleh gerakan dan diperjuangkan. *Keempat*, kegiatan penerimaan, pembinaan, pemutusan anggota, sistem kepemimpinan dan hubungan sosial. *Kelima*, pengikut setia gerakan yang selalu patuh kepada pemimpin. *Keenam*, simbol kebudayaan.¹⁹⁵

Gerakan politik Islam bersifat sentral, yaitu semua kegiatan harus disentralkan pada ajaran agama, universalitas yaitu mendunia dan revolusioner yang menghendaki perubahan yang fundamental suatu rekonstruksi sosial dan moral masyarakat.¹⁹⁶ Selain itu bersifat *ishlah* (reformasi) dan *tajdid* (pembaharuan).¹⁹⁷

Menurut Kuntowijoyo gerakan Islam sebagai gerakan kultural dibagi ke dalam tiga sub yaitu: *Pertama*,

¹⁹⁴ Siti Mutiah Setiawati, *Kekuatan Gerakan Politik Islam di Timur Tengah dari Iran Hingga Al-Jazair*, (Yogyakarta: Laporan Penelitian Jurusan Hubungan Internasional FISIPOL UGM, 2003), hlm. 26.

¹⁹⁵ Sidik Jatmika, *Genk Remaja: Anak Haram Sejarah ataukah Korban Globalisasi ?* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010), hlm. 20.

¹⁹⁶ Amin Rais, dalam Siti Mutiah Setiawati, *Kekuatan Gerakan Politik Islam.....*, hlm. 52.

¹⁹⁷ Karel Armstrong, *Berperang Demi Tuhan, Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*, terj., Satrio Wahono, dkk, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 49.

Islam sebagai gerakan intelektual, yaitu gerakan yang mengangkat nilai-nilai Islam sebagai konsep ilmu dibidang sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. *Kedua*, Islam sebagai gerakan etik, yaitu gerakan yang menumbuhkan serangkaian sikap atau etos tentang sesuatu, misalnya dalam bidang ekonomi selain perlu pertumbuhan juga pemerataan, keadilan dan kebersamaan. *Ketiga*, Islam sebagai gerakan estetis, yaitu gerakan yang mengupayakan terciptanya lingkungan simbolik yang lebih bermakna ke-Islaman.¹⁹⁸

Suatu gerakan politik muncul menurut Siti Mutiah Setiawati setidaknya-didaknya dilatarbelakangi oleh enam faktor yaitu: *Pertama*, terjadi penindasan dan penjajahan dari kekuatan asing, terutama Eropa yang kemudian digantikan oleh Amerika. *Kedua*, adanya penguasa yang sangat represif, otoriter, korup dan dekat dengan kekuatan asing. *Ketiga*, adanya penguasa yang dekat dengan kekuatan asing telah meninggalkan prinsip-prinsip Islam dalam bernegara dan menggantikan dengan prinsip sekuler. *Keempat*, peminggiran kekuatan Islam oleh pemerintah pusat. *Kelima*, ketika negara mengalami krisis ekonomi, gerakan ini memperoleh dukungan dari rakyat. *Keenam*, kehadiran kekuatan asing khususnya di Timur Tengah yang menawarkan konsep-konsep politik seperti demokrasi, HAM, pluralisme yang tidak sesuai dengan ideologi Islam.¹⁹⁹ Tujuan gerakan politik Islam adalah menerapkan syariat Islam dalam seluruh segi kehidupan, baik bidang

¹⁹⁸ Sudirman Tabba, "Islam di Indonesia", dalam *Jurnal Sosial Politik*, Vo. 2 November 1998, hlm. 63, lihat juga Lily Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes, Sejarah perkembangan partai-partai Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hm. 86.

¹⁹⁹ Siti Mutiah Setiawati, *Kekuatan Gerakan Politik Islam.....*, hlm. 5-9.

politik yang berkaitan dengan negara dengan cara mendirikan negara Islam, melakukan perlawanan terhadap sekularisme dan imperialisme di negara-negara muslim maupun negara yang penduduknya mayoritas muslim.²⁰⁰ Untuk menyebut gerakan politik Islam Joel Benin menggunakan istilah *political Islam* atau Islam politik. Gerakan ini menjadikan al-Qur'an, Hadis dan teks-teks keagamaan lainnya sebagai dasar gerakan dan menjustifikasi pendirian dan tindakan mereka.²⁰¹

Kelahiran gerakan politik pada suatu negara tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor: *Pertama*, respon terhadap problem sosial seperti pengangguran, kejahatan yang tidak ditangani secara cepat dan tepat oleh pemerintah. *Kedua*, problem ekonomi seperti terjadi kemiskinan, kelaparan massal dan penyakit yang tidak memperoleh penyelesaian secara tepat oleh pemerintah. *Ketiga*, penguasaan asing terhadap sumber-sumber ekonomi negara secara tidak adil. *Keempat*, intervensi asing terhadap urusan internal negara, seperti pergantian kepemimpinan (politik). *Kelima*, reaksi terhadap sistem dan tatanegara yang dipraktikkan pemerintah yang tidak sesuai dengan ideologi rakyat. *Keenam*, diskriminasi yang dilakukan pemerintah terhadap kelompok muslim.

Gerakan politik Islam yang terjadi di berbagai negara, khususnya negara muslim sesungguhnya mempunyai kesamaan misi yang diperjuangkan yaitu: *Pertama*, terwujudnya Negara Islam dan menggantikan negara sekuler yang memiliki kedekatan dengan negara

²⁰⁰ Sudarno Sobron, *Dinamika Gerakan.....*, hlm. 41.

²⁰¹ Joel Benin and Joe Stork (ed), *Political Islam Essay From Middle East Report*, hlm. 3-4.

Barat sekuler. Pemisahan agama dengan negara sesungguhnya tidak berdasar, karena agama dan negara pada hakikatnya satu *din wa daulah* satu kesatuan yang integral. *Kedua*, mengganti sistem pemerintahan sekuler yang berpihak kepada Barat dengan sistem pemerintah Islam seperti dengan *Khilafah Islamiyyah*. *Ketiga*, ideologi gerakan politik adalah *Din al-Islami* (agama Islam) yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadis. Islam merupakan agama yang sempurna yang memberikan pedoman kehidupan ekonomi, sosial, politik dan ketahanan. Islam tidak memisahkan antara masalah *ukhrawi* dan *duniawi*. *Keempat*, gerakan politik Islam bersifat fundamental, sehingga strategi dan *manhaj* yang digunakan sering mengambil jalan kekerasan dan perang untuk meraih kekuasaan yang disebut dengan jihad yang bernilai ibadah, sehingga menjadi kewajiban setiap muslim untuk melakukannya. *Kelima*, penerapan Islam dalam arti sesungguhnya, yaitu dalam ranah perdata, pidana dan *ahwalu asy-syakhsyiyah*. Hukum Islam harus diterapkan menjadi hukum negara dengan keyakinan bahwa menggunakan hukum Allah akan membawa kepada tatakehidupan sosial politik berjalan dengan baik.²⁰²

1.6.6 Politik Keagamaan

Untuk pertama kalinya kata politik digunakan oleh Aristoteles yang disebut *zoon politikon*. Dalam bahasa Yunani Kuno politik diambil dari kata "*Polis*" yang berarti Negara kota dan "*teta*" yang berarti urusan, dalam bahasa Yunani adalah negara yang berkuasa.²⁰³ Yang kemudian

²⁰² Sudarno Subron, *Dinamika Gerakan.....*, hlm. 43.

²⁰³ Fuad Mohd. Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1986), hlm. 62.

diperoleh kata *politike episteme* (ilmu politik) *politician* (pemerintahan negara), *politikos* (kewarga negaraan) dan *polities* (warga negara).²⁰⁴ Dalam bahasa Inggris politik berasal dari kata *politic* yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan yang secara leksikal berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*.²⁰⁵ Kata politik yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia mengandung arti,²⁰⁶ segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelecikan dan sebagai nama sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik. Juga dalam arti “kebijakan dan cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani satu masalah). Sebagai contoh adalah politik bahasa nasional adalah kebijakan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan dan ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengelolaan keseluruhan masalah bahasa.²⁰⁷

Istilah politik dalam bahasa Arab terambil dari akar kata *sasa, yasusu* yang diartikan mengemudi, mengendalikan, melatih, dan mengatur.²⁰⁸ Salah satu karya Ibnu Taimiyah (1263-1328) dinamainya dengan *As-Siyasah asy-Syar'iyah* (Politik Keagamaan). Uraian al-Quran tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata hukum. Kata ini pada mulanya

²⁰⁴ *Image courtesy Tri Agung Kristanto of <http://kapsel-fikom-untar-gjl 2013-kelasc5.blogspot.com/2013/11/politik-pemilu-dan-masyarakat.html>*

²⁰⁵ Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 35.

²⁰⁶ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 42, lihat juga *KBBI*....., hlm. 886.

²⁰⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*....., hlm. 887.

²⁰⁸ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 1035.

berarti “menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan”. Dari akar kata yang sama terbentuk kata hikmah yang pada mulanya berarti kendali. Makna ini sejalan dengan asal makna kata *sasa-yasusu-sais siyasat* yang berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali dan cara pengendalian. Hukum dalam bahasa Arab tidak selalu sama artinya dengan kata “hukum” dalam bahasa Indonesia yang oleh kamus dinyatakan antara lain berarti “putusan”. Dalam bahasa Arab kata ini berbentuk kata jadian yang bisa mengandung berbagai makna, bukan hanya bisa digunakan dalam arti “pelaku hukum” atau diperlakukan atasnya hukum, tetapi juga ia dapat berarti perbuatan dan sifat. Sebagai “perbuatan” kata hukum berarti membuat atau menjalankan putusan dan sebagai sifat yang menunjuk kepada sesuatu yang diputuskan.”

Menurut Miriam Budiardjo pada umumnya politik itu merupakan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.²⁰⁹ Politik dalam pandangan Isjware adalah teknik-teknik perjuangan untuk memperoleh dan menjalankan kekuasaan, mengatasi masalah, mengontrol kekuasaan, membentuk dan menggunakan kekuasaan.²¹⁰ Politik menurut Deliar Noer adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan untuk mempengaruhi dengan cara mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat.²¹¹

²⁰⁹Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu*....., hlm. 96.

²¹⁰*Image courtesy Tri Agung Kristanto of <http://kapsel-fikom-untar-gjl2013-kelasc5.blogspot.com/2013/11/politik-pemilu-dan-masyarakat.html>.*

²¹¹Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran*....., hlm. 14-15.

Menurut Aristoteles politik adalah usaha yang dilakukan oleh negara untuk mewujudkan kebaikan yang ingin dicapai bersama. Oleh karena itu, politik dapat dimaknai sebagai sebuah aktivitas dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut.

Secara etimologi istilah “agama” berasal dari kata “agama” yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” sehingga menjadi keagamaan. Dalam KBBI dinyatakan bahwa agama adalah ajaran yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungannya. Keagamaan (kata benda) yang berhubungan dengan agama.²¹²

Agama adalah hubungan antara manusia dengan suatu kekuasaan dengan rasa tunduk dan memperlakukannya secara khidmat. Atau agama adalah apa yang di syari’atkan Allah dengan perantara Nabi-Nabi-Nya berupa perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat.²¹³ Agama merupakan pegangan atau pedoman yang dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, politik keagamaan dapat dimaknai sebagai kebijakan negara atau penguasa untuk mengatur agama dan kehidupan umat beragama. Politik keagamaan adalah sebagai kebijakan formal suatu negara mengenai agama. Politik keagamaan mencakup pembuatan

²¹² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 12.

²¹³ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia Jilid I*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, t.th), hlm. 104-105.

dan pembaharuan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu ajaran agama yang disesuaikan dengan kebutuhan umat beragama dan pelaksanaan hukum agama (ibadah, muamalah dan lain-lain) oleh umat beragama dalam suatu negara.

Politik keagamaan dalam penelitian ini adalah kebijakan negara melalui Kementerian Agama dalam mengelola masalah-masalah keagamaan di Indonesia. Ciri politik keagamaan adalah menggunakan pengaruh agama dalam kehidupan politik bangsa, pengaturan kehidupan umat beragama secara sistematis dan terstruktur serta pembinaan kehidupan agama dan umat beragama secara berencana dan berkelanjutan.

Peranan agama menurut Donald Eugene Smith dalam pembangunan politik di Barat sangat penting. Karena agama telah memberikan sumbangan terhadap pembatasan kekuasaan pemerintah dan kebebasan perorangan, maka agama secara langsung terlibat dalam proses modernisasi melalui pergolakan, berinteraksi dengan ideologi-ideologi besar, mendorong timbulnya partai-partai politik dan menjadi faktor yang berpengaruh dalam pembentukan budaya politik.²¹⁴

Dalam sistem politik keagamaan dikenal dengan sistem politik keagamaan tradisional yaitu:

- a. Agama sepenuhnya menyediakan komponen ideologis sistem politiknya yang tidak bercampur dengan ideologi-ideologi sekuler. Keabsahan sistem tersebut

²¹⁴ Donald Eugene Smith, *Religion and Political Development, Analytic Study*, Judul terjemah: *Agama dan Modernisasi Politik, Suatu Kajian Analitis*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm. 47.

terpelihara oleh gagasan-gagasan keagamaan yang selalu muncul dalam kehidupan politik.

- b. Masyarakat dalam sistem politik keagamaan tradisional identik dengan masyarakat agama, baik secara teori, substansial maupun dalam kenyataannya. Penyimpangan terhadap keyakinan keagamaan akan memperoleh sangsi, kerana dianggap bertentangan dengan kesetiaan kepada penguasa yang sakral.
- c. Sistem sosial yang terintegrasi dan terabsahkan secara keagamaan dan bukan merupakan pemerintahan yang efisien yang dapat memelihara stabilitas masyarakat dalam waktu tertentu.
- d. Para tokoh agama melaksanakan ritual-ritual esensial yang mengabsahkan kekuasaan kerajaan, sekaligus berfungsi sebagai penasihat raja serta menanamkan kepada rakyat bahwa kepatuhan kepada kekuasaan yang ditakdirkan Tuhan adalah sebuah kebaikan.²¹⁵

Fungsi-fungsi keagamaan bersifat ekstensif, ia merupakan sistem politik keagamaan terpadu yang berfungsi sangat luas termasuk menegakkan disiplin, menyusun hirarkhi kepemimpinan dan melaksanakan sidang-sidang majelis agama untuk memperbaharui doktrin-doktrin keagamaan dan, para penguasa merupakan pembela keimanan.²¹⁶

Sistem politik keagamaan organis adalah sebuah konsepsi penyatuan fungsi-fungsi agama dan politik yang dilaksanakan oleh suatu struktur yang menyatu. Penguasa melaksanakan kekuasaan baik temporal maupun spiritual dan fungsi utamanya ialah memelihara tatanan sosial yang

²¹⁵ Donald Eugene Smith, *Religion And Political Development.....*, hlm. 65.

²¹⁶ Donald Eugene Smith, *Religion and Political Development.....*, hlm. 7-8.

sakral sesuai dengan hukum-hukum suci dan tradisi. Dalam sistem politik keagamaan organis ini terdapat tiga komponen esensial yaitu: *Pertama*, suatu ideologi keagamaan integralis yaitu terdapat suatu konsep komunitas yang keseluruhannya diatur oleh agama. *Kedua*, adanya mekanisme internal kontrol keagamaan yaitu penyesuaian tingkah laku sosial kepada norma-norma keagamaan yang sebagian besar dipengaruhi oleh mekanisme kontrol internal (baik adat-istiadat maupun persetujuan kelompok kecil) bukan merupakan paksaan dari pemegang kekuasaan yang terpisah dan menentang masyarakat. *Ketiga*, adanya kekuasaan politik yang dominan, yaitu pemeliharaan tatanan sosial keagamaan secara menyeluruh menjadi tanggungjawab kekuasaan politik. Dalam sistem organisasi, konflik keagamaan relatif kecil karena penguasa memahami peranannya dalam kerangka ideologi keagamaan dan tidak terdapat struktur *eklesiastik* yang terorganisasi dengan baik yang mampu menyaingi secara politik.²¹⁷

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk menemukan esensi dari sebuah fenomena.²¹⁸ Dengan model penelitian studi kasus (*case study*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Bikien studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan

²¹⁷ Donald Eugene Smith, *Religion And Political Development... ..*, hlm. 69.

²¹⁸Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi III, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 5.

dokumen atau satu peristiwa tertentu.²¹⁹ Surahmat,²²⁰ membatasi pendekatan studi kasus adalah pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Berdasarkan batasan tersebut dapat dipahami bahwa batasan studi kasus meliputi: (1) sasaran penelitian dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen, (2) sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada diantara variabel-variabelnya.

Strategi yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah studi kasus. Studi kasus adalah menemukan kebenaran ilmiah secara mendalam dalam waktu lama untuk menemukan kecenderungan, pola, arah dan interaksi banyak faktor yang dapat memacu atau menghambat perubahan.²²¹ Selain bersifat kualitatif penelitian ini juga bersifat deskriptif,²²² Analitis yaitu penyelidikan yang

²¹⁹ Bogdan, dkk., *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Method*, (Sidney: Allyn and Bacon, Inc, 1982), hlm. 23.

²²⁰ Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 2004), hlm. 46.

²²¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*....., hlm. 38.

²²² Deskripsi, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan *tertentu* antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis, adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sedangkan komparasi, adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Dengan komparasi, dapat ditentukan secara tegas kesamaan dan perbedaan sesuatu hingga hakikat objek dapat dipahami dengan semakin murni. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-49.

berusaha mencari pemecahan masalah yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki.²²³ Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis yaitu melihat keaslian dari setiap fakta dan data yang ada.²²⁴ Penelitian ini menggunakan ragam analisis penelitian kualitatif dengan instrumen analisis deduktif dan interpretatif.²²⁵

1.7.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah tokoh-tokoh Syi'ah Indonesia yang dianggap banyak mengetahui tentang Syi'ah Indonesia yang dijadikan sebagai informan kunci dalam penelitian ini. Demikian juga dokumen yang memuat data tentang Syi'ah Indonesia yang berkaitan dengan data penelitian yang dibutuhkan dijadikan sebagai sumber data primer. Untuk memperoleh data dari sumber primer dilakukan dengan wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini dilakukan untuk menggali sebanyak-banyaknya data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga dapat mengungkapkan semua fenomena gerakan Syi'ah Indonesia dalam mempertahankan eksistensi dirinya. Adapun sumber sekunder adalah berupa literatur. Literatur-literatur, dokumen-dokumen, liputan pers yang diterbitkan, buku-buku laporan penelitian, artikel-artikel yang sudah terbit

²²³ Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian*....., hlm. 37.

²²⁴ George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi dari Teori*....., hlm. 126.

²²⁵ Deduksi merupakan langkah analisis dari hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan interpretative artinya menafsirkan, membuat tafsiran tetapi yang tidak bersifat subjektif, dengan bertumpu pada evidensi objektif untuk mencapai kebenaran yang objektif. Dengan instrumen tersebut diuraikan pandangan masing-masing tokoh tersebut terlebih dahulu lalu dicari metode pendekatan dan substansi pemikiran. Sudarto, *Metode Penelitian*, hlm. 42-43.

atau yang tidak diterbitkan, tentang kajian Syi'ah di Indonesia.

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan cara *probability sampling* dan *nonprobability sampling*. Teknik penarikan sampel ini akan dijelaskan sebagai berikut: (1). *Purposive Sampling*. Purposif sampling yang sering disebut dengan sampling pertimbangan. Purposif sampling adalah teknik sampling yang peneliti gunakan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu yaitu menentukan sampel dari tokoh-tokoh Syi'ah yang dianggap mampu memberikan keterangan atau data yang diperlukan dalam penelitian ini. (2) *Snowball Sampling*. Snowball sampling adalah teknik sampling yang jumlah informan pada awalnya sedikit kemudian anggota informan mengajak temannya untuk dijadikan sampel, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Teknik sampling ini biasanya cocok untuk penelitian kualitatif. Apabila informasi atau data yang dikumpulkan masih kurang akan dilakukan berulang-ulang (*snowball*) sampai kebutuhan informasi atau data terpenuhi dan memperoleh kejelasan.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang penulis lakukan dalam pengumpulan data adalah: *Pertama*, melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam adalah proses mencari informasi dari informan kunci yang ditemukan dalam proses penelitian di lapangan. Teknik pengumpulan data yang utama adalah dengan cara wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dibantu dengan pedoman

wawancara, serta observasi secara langsung.²²⁶ Pengumpulan data yang dilakukan di lapangan yaitu mencari informan dari tokoh-tokoh Syi'ah kemudian mewawancarai informan satu persatu secara mendalam mengenai bagaimana mengelola kegiatan Syi'ah dan bagaimana pergulatan Syi'ah dalam mempertahankan eksistensinya di Indonesia. Wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada informan kunci yaitu tokoh-tokoh dan aktivis Syi'ah Indonesia. Penentuan informan kunci yang akan diwawancara dilakukan menggunakan purposif sampling. Wawancara kepada tokoh dan aktivis Syi'ah dilakukan di wilayah Yogyakarta, Pekalongan, dan Jepara. *Kedua*, selain wawancara mendalam teknik yang digunakan adalah dokumentasi,²²⁷ yang memuat data yang diperlukan baik data primer maupun sekunder yang termuat dalam buku, laporan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang memuat aktivitas Syi'ah. Kajian dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi mengenai sejarah dan perkembangan Syi'ah dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Metode pencarian data ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu suasana penelitian. Dokumentasi ini akan

²²⁶ Burhan M. Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenama Media Group, 2007), hlm. 52.

²²⁷ Dokumen, adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada masa lalu. Lihat W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm.123, lihat juga Sotirios Sarantakos, *Social Research*, (Melbourne: Mac Millan Education Australia PTY LTD, 1993), hlm. 206. Dokumentasi adalah usaha pencarian data mengenai variable yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat dll, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 236.

berguna untuk mengecek data yang telah terkumpul. Pengumpulan data dilakukan secara bertahap dan sebanyak mungkin peneliti berusaha mengumpulkannya. Maksudnya jika nanti ada yang terbuang atau kurang relevan, peneliti masih bisa memanfaatkan data lain. Metode dokumentasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Meskipun metode observasi dan wawancara menempati posisi dominan dalam penelitian kualitatif. Metode dokumenter sekarang ini perlu mendapatkan perhatian selayaknya walaupun dahulu bahan dari jenis ini kurang dimanfaatkan secara maksimal.²²⁸ Namun demikian menurut Sugiyono mengenai pemanfaatan bahan dokumenter ini yang perlu diperhatikan bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi, sehingga perlu lebih selektif dalam pemanfaatannya.²²⁹ Adapun data lapangan tentang gerakan Syi'ah di Indonesia diperoleh melalui studi lapangan dengan wawancara dan dokumen.²³⁰ *Ketiga*, pengamatan merupakan teknik yang juga digunakan dalam penelitian ini untuk melihat pelaksanaan kegiatan Syi'ah. Teknik ini digunakan untuk melihat aktivitas-aktivitas keagamaan

²²⁸ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 85.

²²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: ALFABETA, 2015), hlm. 83.

²³⁰ Wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan tanya jawab oleh seorang interviwer kepada informan utamanya data tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat, Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia cetakan ke 7, 1998), hlm. 129 dan Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta cetakan ke 13, 2011), hlm. 194, lihat Bagong Suyanto, Sutinah, (Ed), *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 67, W. Gulo, *Metodologi Penelitian.....*, hlm. 119, Sotirios Sarantakos, *Social Research.....*, hlm. 178.

yang dipraktikkan.²³¹ Data kegiatan keagamaan, sosial dan politik Syi'ah diperoleh dilokasi menggunakan wawancara mendalam kepada tokoh-tokoh Syi'ah yang dianggap mengetahui tentang gerakan Syi'ah, dokumen dan observasi²³² dilakukan terhadap aktivitas Syi'ah selama masa penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data primer maupun sekunder.

1.7.4 Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif adalah teknik yang mendasarkan pada data kualitatif atau data yang merupakan wujud dari kata-kata.²³³ Jika penelitian kuantitatif mengukur kesahihan penelitian dengan angka-angka dan bersifat verifikatif, maka penelitian kualitatif bersifat eksploratif yaitu mencari data dengan cara mengeksplorasi objek penelitian secara *holistik* (menyeluruh),²³⁴ dan mendalam untuk memperoleh kesimpulan yang mendalam dan berkualitas. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bersamaan pada waktu berlangsung pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data. Pada saat berlangsungnya wawancara (*indepth interview*) analisis

²³¹Dede Mulyana, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 85.

²³² Observasi adalah pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, lihat Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 129. Observasi, lihat juga W. Gulo, *Metodologi Penelitian.....*, hlm.116, Sotirios Sarantakos, *Social Research.....*, hlm. 222, Mark Abrahamson, *Social Research Methods*, Prentice-Hall, INC, Englewood Cliff, N. J 07632, 1983, hlm. 293.

²³³Mathew B, . at.al, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 30.

²³⁴M. Deden Ridwan, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu* (Bandung: Nuansa, 2001), hlm. 266.

sudah dilakukan terhadap jawaban yang kurang memuaskan kemudian dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang lebih mendalam dan dianggap kredibel.

Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

- a. *Reduksi* data adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dari data yang telah dikumpulkan. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sampai akhir penelitian.
- b. *Display* data. Data yang berhasil dikumpulkan dijabarkan dalam bentuk kategori-kategori untuk mempermudah proses verifikasi.
- c. *Verifikasi* data. Data dikelompokkan sesuai dengan kategori masing-masing.
- d. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis bagan, tabel dan lain-lain.
- e. Penarikan kesimpulan yakni suatu upaya menarik kesimpulan dari semua hal yang terdapat dalam reduksi dan sajian data.
- f. Penulisan. Laporan penelitian ditulis didasarkan hasil pengolahan data. Setelah proses penafsiran data selesai kemudian disajikan dalam bentuk tulisan dengan menuliskan kutipan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interpretatif yakni dengan menginterpretasikan data dalam konteks kulturalnya dan kemudian data dipahami sebagai konstruk identitas Syi'ah Indonesia.

1.8 Sistematika Pembahasan

Untuk menjaga konsistensi pemikiran dalam menjawab masalah penelitian ini, sistematika disertasi dikelompokkan dalam beberapa Bab yaitu:

Bab I yang merupakan pendahuluan dari penelitian. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, mengapa masalah ini dipilih, tujuan yang dicapai melalui penelitian ini, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, yaitu bagaimana penelitian ini dilaksanakan, serta sistematika pembahasan.

Bab II Mazhab Syi'ah dalam lintasan sejarah di dunia dan Indonesia, memaparkan tentang nama, latar belakang dan asal-usul Syi'ah, aliran Syi'ah, pemikiran politik Syi'ah dan sejarah perkembangan Syi'ah di Indonesia.

Bab III, Syi'ah dalam Sistem politik Indonesia, bab ini memaparkan Syi'ah dalam sistem politik yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia serta praktik politik keagamaan di Indonesia.

Bab IV gerakan Syi'ah dalam mempertahankan eksistensinya dalam konstelasi politik keagamaan di Indonesia, bab ini merupakan kerangka untuk menjawab permasalahan penelitian yang akan mendeskripsikan unsur-unsur gerakan Syi'ah mempertahankan eksistensinya dalam konstelasi politik keagamaan di Indonesia

Bab V, Dinamika Konflik dan Integrasi Syi'ah dalam mempertahankan eksistensinya di Indonesia. Bab ini memaparkan dinamika dan integrasi Syi'ah dalam upaya mempertahankan eksistensinya di Indonesia.

Bab VI merupakan bagian akhir. Bab ini berisi kesimpulan penelitian.

1.9 Publikasi Ilmiah

Karya ilmiah peneliti yang telah dipublikasikan dalam beberapa tahun terakhir, dalam bentuk artikel jurnal ilmiah adalah:

- 1.9.1 Dinamika Gerakan Syi'ah Mempertahankan Eksistensinya Dalam Konstelasi Politik Keagamaan di Indonesia, dimuat dalam Jurnal Al-Manar, Volume 7, Nomor 1, Juni 2018 (Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam STAIMS Yogyakarta, ber- ISSN 2252-7265 dan E-ISSN 26158779).
- 1.9.2 Pemikiran Dasar Islam Aspek Demokrasi, dimuat dalam Jurnal Al-Manar, Volume 1, Nomor 1, Juni 2012 (Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam STAIMS Yogyakarta, ber- ISSN 2252-7265).
- 1.9.3 Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid Dalam Kisah Nabi Ibrahim AS dan Relevansinya Dengan Konteks Masakini (Studi Tafsir Al-Misbah), dimuat dalam Jurnal Al-Manar, Volume 2, Nomor 1, Juni 2013 (Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam STAIMS Yogyakarta, ber- ISSN 2252-7265).